



**PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**



2
0
2
3

LAPORAN

PENYUSUNAN KAJIAN MASTERPLAN INVESTASI KOTA SURAKARTA

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Surakarta**

Gedung Tawang Praja Lantai 1, Komplek Balaikota Surakarta
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta
Email : balitbangdaska@surakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkah dan karunianya, Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian kajian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan mengacu pada target pencapaian output yang ditetapkan dalam kerangka acuan kerja.

Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta berisikan gambaran mengenai profil investasi di Kota Surakarta. Profil tersebut secara detail menjelaskan mengenai gambaran ragam investasi yang selanjutnya menjadi acuan dalam menetapkan perencanaan jangka panjang terhadap potensi investasi dalam berbagai skala. Perencanaan masterplan investasi ditetapkan dalam jangka panjang yaitu periode 2025-2045. Melalui kajian ini, diharapkan akan dapat mempermudah Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan promosi peluang investasi kepada calon investor.

Untuk memastikan masterplan investasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, Pemerintah Kota Surakarta pada setiap tahapan akan melakukan identifikasi dan penyelarasan terhadap prioritas investasi lima tahunan. Hal ini perlu dilakukan guna mengintegrasikan perencanaan investasi jangka panjang ini ke dalam perencanaan investasi jangka menengah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta dari awal sampai akhir. Semoga hasil kajian ini mampu memberikan landasan dalam penentuan kebijakan dan program pengembangan investasi dalam mendukung pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sasaran	I-7
1.5. Ruang Lingkup	I-7
1.6. Sistematika Laporan	I-9
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN	II-1
2.1. Dokumen Pembangunan Bidang Investasi	II-1
2.2. Visi Dan Misi Bidang Investasi	II-7
BAB III PROFIL INVESTASI KOTA SURAKARTA	III-1
3.1. Perkembangan Investasi	III-1
3.2. Kebijakan Tata Ruang	III-13
3.3. Potensi Investasi	III-21
BAB IV PELUANG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA	
4.1. Pemanfaatan Peluang Investasi Berdasarkan Arah Pengembangan Wilayah Kota Surakarta	IV-1
4.2. Promosi Investasi Unggulan Kota Surakarta	VI-3
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi dan Misi.....	V-1
5.2. Tujuan	V-4
5.3. Sasaran V.....	V-4
BAB VI ROADMAP INVESTASI	VI-1
6.1. Sektor Ekonomi Unggulan	VI-1
6.2. Variabel Kunci Investasi	VI-8
6.3. Analisis Kesenjangan	VI-23
6.4. Action Plan Investasi	VI-33
6.5. Tahapan Capaian Pengembangan Investasi	VI-41
BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
7.1. Arah Kebijakan	VII-1
7.2. Strategi	VII-3
BAB VIII PENUTUP	
8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Rekomendasi	VIII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Konsistensi Kebijakan Bidang Investasi Kota Surakarta	II-4
Tabel 2.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Surakarta	II-8
Tabel 3.1. Investasi Menurut Jenis Usaha Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	III-2
Tabel 3.2. Investasi Berdasarkan Realisasi Kota Surakarta Tahun 2017-2022	III-4
Tabel 3.3. Perkembangan Pariwisata di Kota Surakarta	III-11
Tabel 3.4. Perbandingan Wisatawan Kota Surakarta dan Nasional	III-12
Tabel 3.5. Lama Tinggal Wisatawan di Kota Surakarta	III-13
Tabel 3.6. Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020	III-15
Tabel 3.7. Jumlah Usaha di Kota Surakarta (Unit)	III-17
Tabel 3.8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	III-22
Tabel 3.9. Indeks LQ Kota Surakarta Tahun 2018-2022	III-25
Tabel 3.10. Analisis Shift Share Kota Surakarta Tahun 2010-2022 (Juta Rp)	III-28
Tabel 3.11. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022	III-33
Tabel 3.12. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022	III-34
Tabel 3.13. Matriks Tipologi Klasen	III-35
Tabel 4.1. Daftar Proyek Investasi yang Berpeluang Dipromosikan	IV-1
Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Investasi di Kota Surakarta	V-5
Tabel 6.1. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kota Surakarta	VI-2
Tabel 6.2. Potensi Sektor Ekonomi Kota Surakarta	VI-4
Tabel 6.3. Analisis TOWS Investasi Kota Surakarta	VI-10
Tabel 6.4. Variabel Kunci Investasi Kota Surakarta	VI-21
Tabel 6.5. Analisis Kesenjangan Pengembangan Investasi Surakarta	VI-25
Tabel 6.6. Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Surakarta	VI-34
Tabel 7.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Investasi Kota Surakarta	VII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja .	II-2
Gambar 2.2	Kebijakan Bidang Investasi di Kota Surakarta	II-3
Gambar 3.1	Perkembangan Investasi Menurut Jenis Usaha Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	III-3
Gambar 3.2	Perkembangan Investasi Menurut Status Modal Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	III-6
Gambar 3.3	Sub Sektor Industri PMA di Kota Surakarta.....	III-7
Gambar 3.4	Sub Sektor Industri PMDN di Kota Surakarta	III-8
Gambar 3.5	Negara Asal PMA di Kota Surakarta (Triliun Rupiah).....	III-9
Gambar 3.6	Perbandingan Wisawatan Mancanagara dan Wisatawan Nusantara di Kota Surakarta	III-11
Gambar 3.7	Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta	III-14
Gambar 3.8	Penggunaan Lahan Kota Surakarta	III-16
Gambar 6.1	The House of Investment Kota Surakarta	VI-8
Gambar 6.2	<i>Pipeline</i> Masterplan Pengembangan Investasi.....	VI-40

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan wilayah, sekaligus menunjukkan terjadinya pergerakan sektor-sektor ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh perubahan output dalam perekonomian itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005).

Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara. Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*" mengemukakan faktor – faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpaduan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000 : 53).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini, Adam Smith mengemukakan pertumbuhan output total dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur pokok dari sistem produksi, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah). Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk). Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
3. Stok barang modal. Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam).

Ketiga unsur di atas memiliki peran penting bagi suatu wilayah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki ketiga unsur tersebut secara penuh, sehingga memerlukan strategi-strategi tertentu dalam menghasilkan faktor produksi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kota Surakarta, sebagai salah satu wilayah dengan keterbatasan dari sisi sumber daya alam, namun memiliki keunggulan dari sisi letak geografis dan pertumbuhan penduduknya. Seperti kita ketahui, letak geografis Kota Surakarta yang berada di tengah, serta menjadi simpul pertemuan jaringan transportasi darat, mendukung peran Kota Surakarta sebagai pusat dari wilayah pengembangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebaran PDRB kabupaten/kota di Subosukawonosraten pada tahun 2021, Kota Surakarta memberikan kontribusi paling besar dibanding dengan 6 kabupaten lainnya yaitu sekitar 18,91% dari total PDRB Subosukawonosraten. Di satu sisi, Kota Surakarta sendiri memiliki kendala terkait dengan ketersediaan lahan yang semakin sempit. Merujuk pada peta tata guna tanah RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041, sisa lahan yang belum

terbangun di Kota Surakarta sebesar 10,3% dari luas wilayah kota sebesar 4.672,31 Ha (sebesar 481,25 Ha).

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%, dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 6,25%. Kondisi ini selaras dengan nasional yang mengalami tren positif ditahun 2022. Sementara itu, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 55.964,80 milyar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 41.066.139,47 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai 14.517,92 miliar rupiah (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.183,47 miliar rupiah, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7.671,54 miliar rupiah. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 4.797,44 milyar rupiah. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 2.889,39 miliar rupiah. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2022 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 265,55 milyar rupiah, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar 31.562.980,46 miliar rupiah pada tahun 2017, menunjukkan kenaikan menjadi sebesar 38.475,99 milyar rupiah pada tahun 2022. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai 9.067,63 milyar rupiah. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8.605,95 milyar rupiah, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7.098,63 milyar rupiah. Sementara itu, dilihat dari persentase pertumbuhannya, terdapat tiga

sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%, dan sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,22%. Kenaikan PDRB ADHK 2020 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi penanaman modal asing, jika dikelola dengan baik maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu wilayah, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi Investasi. Dalam ilmu ekonomi makro sendiri, investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pengaruh investasi terhadap perekonomian sebuah negara bisa dilihat dari pendapatan nasional negara tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, besaran investasi di Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 535.613,35 juta rupiah, yang terdiri dari PMDN sebesar 450.421,70 juta rupiah dan PMA sebesar 85.191,65 juta rupiah. Nilai investasi ditahun 2022 tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2021

yang mencapai 154.887,60 juta rupiah. Kenaikan investasi ditahun 2022 sangat signifikan, di mana PMA mengalami kenaikan sebesar 98,06%, sedangkan pada PMDN naik sebesar 65,98%. Artinya terdapat perbaikan kinerja investasi di Kota Surakarta pasca pandemi Covid 19.

Penanaman modal di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penanaman Modal. Penetapan kebijakan penanaman modal tersebut dalam rangka untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, menciptakan kemudahan kepastian berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Selain itu, diharapkan dalam penyelenggaraan penanaman modal mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Surakarta telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta. Pada perubahan Peraturan Walikota tersebut, fokus pada kebijakan pembangunan Kota Surakarta tahun 2021-2025 dengan target investasi pada investasi umum, bidang pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan promosi penanaman modal.

Dengan berbagai kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan langkah-langkah strategis bidang penanaman modal yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut penting dilakukan untuk menuju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi, dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam menarik investor. Untuk itu, pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan rancangan kebutuhan investasi untuk dua puluh tahun ke depan dalam bentuk Masterplan Investasi, yang memberikan gambaran mengenai profil investasi, peluang dan potensi investasi, jenis investasi yang memiliki potensi ditawarkan, rancangan kebutuhan investasi pada sektor-sektor potensial dan target pelaksanaan investasi yang dijabarkan dalam kurun waktu lima tahunan sampai dengan tahun 2045.

1.2. Dasar Hukum

Referensi hukum yang digunakan dalam pekerjaan Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja, menjadi Undang-undang.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan Perencana Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta adalah sebagai dasar penentuan kebijakan dan program

pengembangan investasi serta pembangunan yang lebih rinci dan komprehensif.

Adapun tujuan dari penyusunan kajian adalah:

1. Menyusun profil investasi di Kota Surakarta
2. Mengkaji potensi investasi Surakarta meliputi jenis dan skala/ besaran.
3. Menyusun Master Plan investasi jangka panjang 2025-2045
4. Membantu Pemerintah Kota dalam promosi peluang investasi kepada calon investor.
5. Menyediakan pokok-pokok materi promosi investasi berdasarkan pada hasil kajian ini.

1.4. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Perencana Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta adalah:

1. Tersusunnya informasi potensi dan peluang investasi
2. Tersusunnya daftar investasi yang dapat dikembangkan di Surakarta
3. Tersusunnya informasi peluang investasi di Kota Surakarta sebagai dampak dari kondisi regional-nasional dan intra wilayah
4. Tersusunnya peta potensi investasi untuk kepentingan promosi
5. Tersusunnya Roadmap Investasi Jangka Menengah yang menjadi bagian dari dokumen masterplan investasi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan Perencana Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta, meliputi:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta adalah membantu dan mendampingi Tim Teknis Kota dalam penyusunan dokumen masterplan investasi kota.

Lingkup pekerjaan penyedia jasa adalah:

- a. Melakukan penjabaran KAK, untuk selanjutnya menyusun rencana kerja dan melakukan persiapan-persiapan pekerjaan, serta mengajukannya

kepada Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dalam bentuk Laporan Pendahuluan.

b. Melakukan survei pengumpulan data primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kondisi geografis;
- 2) Kondisi kependudukan;
- 3) Kondisi ketenagakerjaan;
- 4) Kondisi sosial;
- 5) Kondisi ekonomi;
- 6) Kondisi infrastruktur;
- 7) Kondisi Pariwisata;
- 8) Kondisi Budaya;
- 9) Peta Potensi sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta; dan
- 10) Peluang Investasi Kota Surakarta.

Hasil dari survei tersebut selanjutnya diproses dan diolah dalam tahapan analisis. Keluaran dari tahapan ini adalah laporan analisis.

c. Melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan data dan informasi primer dan sekunder dari seluruh *stakeholder* yang berperan dalam proses investasi di Kota Surakarta, yaitu Pemerintah Kota, Swasta, Masyarakat, dan lembaga terkait.

d. Menyusun laporan akhir sebagai keluaran dari pekerjaan masterplan investasi Kota Surakarta.

e. Melakukan Konsultasi Publik (KP) untuk pembahasan *draft* masterplan investasi Kota Surakarta. Konsultasi Publik ini untuk penjaringan isu-isu terkait investasi yang direncanakan dan isu pembangunan prioritas serta penyusunan konsepsi pengembangan investasi di Kota Surakarta yang melibatkan DPRD, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Masyarakat, serta dituangkan dalam bentuk berita acara peserta Konsultasi Publik

2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yaitu seluruh Kota Surakarta.

1.6. Sistematika Laporan

Berikut ini merupakan sistematika Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta.

1. **BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi: latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; keluaran; dan sistematika laporan.
2. **BAB II KAJIAN KEBIJAKAN**, pada bab ini berisi: kajian kebijakan penanaman modal, baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kota Surakarta.
3. **BAB III PROFIL INVESTASI KOTA SURAKARTA**, pada bab ini berisi: perkembangan penanaman modal; kebijakan tata ruang; dan potensi investasi.
4. **BAB IV PELUANG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA**, pada bab ini berisi: potensi investasi berdasarkan tata ruang; dan proyek investasi yang berpeluang dipromosikan.
5. **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**, pada bab ini berisi: visi jangka panjang Investasi di Kota Surakarta yang diterjemahkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran.
6. **BAB VI ROADMAP INVESTASI**, pada bab ini berisi: Sektor ekonomi unggulan, variabel kunci investasi, analisis kesenjangan, action plan investasi, dan tahapan capaian pengembangan investasi.
7. **BAB VII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**, pada bab ini berisi: arah kebijakan dan strategi investasi jangka panjang Kota Surakarta.
8. **BAB VIII PENUTUP**, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian.

BAB II: KAJIAN KEBIJAKAN

2.1. Dokumen Pembangunan Bidang Investasi

Kajian penyusunan *masterplan* investasi di Kota Surakarta dilakukan dengan mengevaluasi konsistensi kebijakan di bidang penanaman modal yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kota Surakarta, baik dokumen rencana pembangunan (RPJPD Kota Surakarta, RPJMD Kota Surakarta, dan Renstra DPMPTSP Kota Surakarta) maupun dokumen kerja (RKPD Kota Surakarta dan Renja DPMPTSP Kota Surakarta).

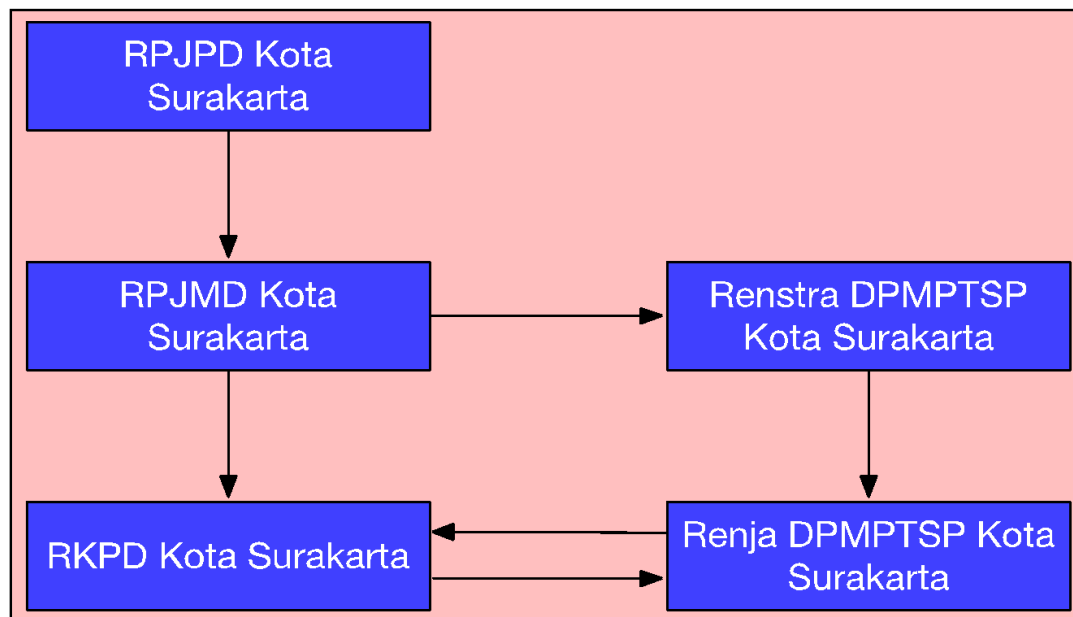
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan deduksi nalar, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkrit.

Analisis akan dimulai dengan menyajikan skema hubungan antara dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta. Pada dasarnya RPJPD merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi dasar penyusunan bagi dokumen rencana pembangunan lain maupun rencana kerja. Meskipun RPJPD sendiri juga disusun mempertimbangkan RPJPD Provinsi, sehingga rencana pembangunan Kabupaten/Kota bisa sejalan dengan rencana pembangunan di tingkat Provinsi.

Oleh sebab itu seluruh kebijakan dalam RPJMD harus sejalan dengan RPJPD karena RPJMD pada dasarnya dokumen yang mengatur pelaksanaan seluruh rencana pembangunan yang ada dalam RPJPD. Demikian pula dengan Renstra OPD yang mestinya juga merupakan dokumen yang mengatur pelaksanaan rencana pembangunan pada satu atau dua bidang tertentu yang ada dalam RPJMD sesuai dengan tupoksi OPD bersangkutan.

Sementara rencana kerja merupakan dokumen operasionalisasi dari setiap kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk

program dan kegiatan. Oleh sebab itu rencana kerja harus mampu mencerminkan seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Dimana setiap kebijakan pembangunan dinyatakan menjadi satu atau beberapa program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahun anggaran.



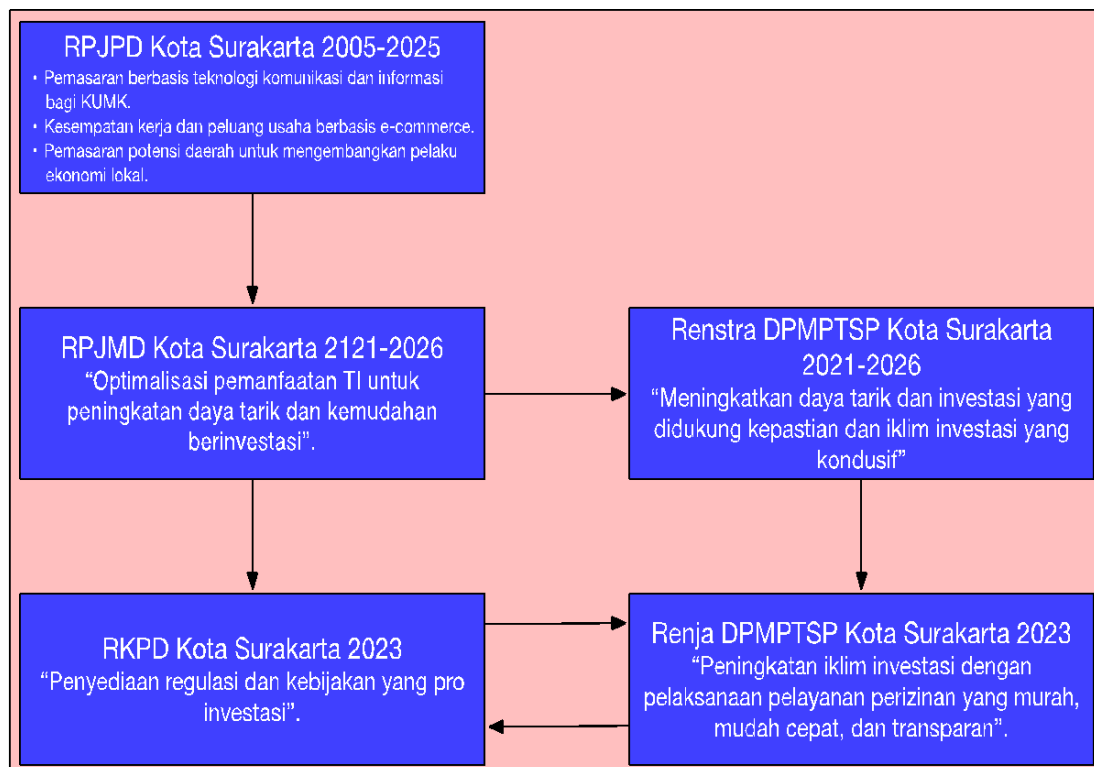
Gambar 2.1: Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Skema di atas selanjutnya akan menjadi dasar untuk mengembangkan indikator evaluasi konsistensi kebijakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang penanaman modal. Dimana konsistensi kebijakan tersebut akan dilihat dari setiap rencana pembangunan dan rencana kerja bidang penanaman modal yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026, RKPD Kota Surakarta tahun 2023, dan Renja DPMPTSP Kota Surakarta tahun 2023.

Indikator konsisten kebijakan akan menggunakan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang posisinya paling tinggi dibandingkan dokumen-dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja lainnya. Oleh sebab itu kekonsistenan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang penanaman modal akan dilakukan dengan membandingkan setiap

kebijakan yang tercantum dalam seluruh dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja di atas.

Untuk itu langkah pertama yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah dengan mengidentifikasi setiap kebijakan di bidang penanaman modal yang ada dalam setiap dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja. Dimana semua kebijakan di bidang penanaman modal yang ada dalam setiap dokumen yang dianalisis akan disajikan ke dalam satu rumusan (*statement*) tertentu agar menjadi relatif mudah untuk dipahami. Hasilnya disajikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 2.2: Kebijakan Bidang Investasi di Kota Surakarta

Skema di atas menunjukkan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Surakarta di bidang penanaman modal yang tercantum dalam beberapa dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja, khususnya RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Kota Surakarta Tahun 2021-2026, RKPD Kota Surakarta Tahun 2023, dan Renja DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2023. Analisis akan dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci (*keyword*) yang digunakan

dalam setiap kebijakan bidang penanaman modal di Kota Surakarta, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Konsistensi Kebijakan Bidang Investasi Kota Surakarta

No	Dokumen	Kata Kunci
1.	RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.	• TIK untuk KUMK • Peluang kerja dan usaha berbasis e-commerce. • Pelaku ekonomi lokal.
2.	RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.	• Teknologi informasi. • Daya tarik dan kemudahan investasi.
3.	RKPD Kota Surakarta Tahun 2023.	• Regulasi pro investasi. • Kebijakan pro investasi.
4.	Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026.	• Daya tarik investasi. • Iklim investasi yang kondusif.
5.	Renja DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2023.	• Iklim investasi. • Perizinan mudah, mudah, cepat, dan transparan.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan beberapa kata kunci yang digunakan dalam dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja di Kota Surakarta yang terkait dengan penanaman modal. Dari kata kunci di atas akan diambil garis merah yang menghubungkan satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi setiap kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal dari setiap dokumen perencanaan dengan RPJPD Kota Surakarta. Hasilnya disajikan dalam di bawah ini.

1. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, setelah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2005-2010 dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2011-2016. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan yang diatur dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memungkinkan hanya beberapa bagian dari keseluruhan kebijakan pembangunan yang disajikan dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Dari tabel di atas tampak bahwa kata kunci yang digunakan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal adalah (1) pemasaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi bagi UMKM, (2) kesempatan kerja dan peluang

usaha berbasis e-commerce, serta (3) pemasaran potensi daerah untuk mengembangkan pelaku ekonomi.

Sementara kata kunci yang ada dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah teknologi informasi serta daya tarik dan kemudahan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kebijakan pembangunan bidang penanaman modal di Kota Surakarta memang hanya sebagian dari kebijakan pembangunan jangka panjang seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025.

Namun demikian fokus perencanaan pembangunan penanaman modal di Kota Surakarta jangka pendek tersebut, khususnya tahun 2021-2025, menunjukkan konsistensi kebijakan dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan kebijakan yang diatur RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Dimana Pemerintah Kota Surakarta ingin mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menarik investasi dalam memberdayakan pelaku ekonomi lokal.

2. Renstra DPMPTSP Kota Surakarta 2017-2022 merupakan dokumen pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk satu bidang tertentu sesuai dengan tupoksinya, yaitu penanaman modal. Oleh sebab itu semua aspek yang diatur dalam kebijakan penanaman modal dalam Renstra DPMPTSP Kota Surakarta harus sejalan dengan kebijakan pembangunan penanaman modal yang ada dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Dari tabel di atas tampak bahwa kata kunci yang digunakan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal adalah teknologi informasi serta daya tarik dan kemudahan investasi. Sementara kata kunci yang ada dalam Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah daya tarik investasi dan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 menggunakan istilah yang tidak sama persis untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal, namun terminologi di atas mempunyai makna sejalan. Dimana Pemerintah Kota Surakarta ingin memanfaatkan teknologi informasi untuk

mewujudkan kemudahan dan kondusifitas usaha maupun investasi sebagai salah satu daya tarik bagi para investor dan pelaku usaha.

3. RKPD Kota Surakarta tahun 2023 merupakan dokumen yang mengatur aspek operasionalisasi dari semua kebijakan yang ada dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu semua aspek yang diatur dalam kebijakan pemberdayaan penanaman modal jangka pendek dalam RKPD Kota Surakarta harus merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan bidang penanaman modal yang ada dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Dari tabel di atas tampak bahwa kata kunci yang digunakan RKPD tahun untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal adalah menyediakan regulasi pro investasi dan kebijakan pro investasi. Sementara kata kunci yang ada dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah teknologi informasi serta daya tarik dan kemudahan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kebijakan pembangunan penanaman modal jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah menyediakan regulasi pro investasi dan kebijakan pro investasi sebagai daya tarik investasi.

Fokus rencana kerja bidang pembangunan penanaman modal tahun 2023 tersebut menunjukkan konsistensi kebijakan dalam dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2023 dengan kebijakan yang diatur RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Dimana Pemerintah Kota Surakarta ingin memanfaatkan teknologi informasi, regulasi pro investasi, dan kebijakan pro investasi sebagai upaya memberi kemudahan dan daya tarik bagi investasi untuk masuk di Kota Surakarta.

4. Renja DPMPTSP Kota Surakarta dokumen yang mengatur aspek operasionalisasi dari semua kebijakan yang ada dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu semua aspek yang diatur dalam kebijakan bidang penanaman modal jangka pendek dalam Renja DPMPTSP Kota Surakarta harus merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan bidang penanaman modal yang ada dalam Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Dari tabel di atas tampak bahwa kata kunci yang digunakan Renja DPMPTSP Kota Surakarta tahun 2023 untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal adalah iklim investasi serta perizinan mudah, mudah, cepat, dan transparan. Sementara kata kunci yang ada dalam Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah daya tarik investasi dan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun Renja DPMPTSP Kota Surakarta tahun 2023 dan Renstra DPMPTSP Kota Surakarta Tahun 2023 menggunakan istilah yang berbeda untuk menyatakan kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal, namun terminologi mempunyai makna sejalan. Dimana Pemerintah Kota Surakarta ingin mewujudkan perizinan mudah, mudah, cepat, dan transparan serta iklim investasi sebagai daya tarik bagi investasi.

Dari analisis yang telah dilakukan ditemukan benang merah kebijakan penanaman modal dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan dan rencana kerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu **“teknologi informasi, regulasi, dan kebijakan pro investasi sebagai daya tarik untuk mendorong pertumbuhan investasi berbasis e-commerce sebagai upaya memberdayakan para pelaku usaha lokal”**. Oleh sebab ada beberapa aspek yang akan dikaji lebih lanjut untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan, program, dan kegiatan bidang penanaman modal yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dicapai oleh Pemerintah Kota Surakarta, khususnya instansi terkait, yaitu:

1. Teknologi informasi.
2. Regulasi dan kebijakan pro investasi.
3. Investasi berbasis e commerce.
4. Pemberdayaan pelaku usaha lokal.

2.2. Visi Dan Misi Bidang Investasi

Visi dan misi penanaman modal Kota Surakarta pada dasarnya diturunkan dari visi dan misi penanaman modal nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Selain itu visi dan misi investasi Kota Surakarta juga sejalan dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Tabel 2.2: Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Surakarta

Aspek	Nasional Perpres Nomor 16 Tahun 2012	Provinsi Jawa Tengah Pergub 52 Tahun 2015	Kota Surakarta Perwali Nomor 40 Tahun 2022
Visi	Penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera.	Menjadikan Jawa Tengah ladang investasi 2025.	Terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota ramah investasi yang aman, berbudaya, dan profesional.
Misi	1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. 2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. 3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.	1. Menciptakan iklim investasi kondusif. 2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. 3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. 4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. 5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal. 6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat.	1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai. 3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha. 4. Mewujudkan investasi yang pro terhadap budaya lokal dan pemanfaatan kearifan lokal serta ramah terhadap lingkungan. 5. Mewujudkan pelayanan prima kepada investor. 6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
Arah Kebijakan	1. Perbaikan iklim penanaman modal. 2. Persebaran penanaman modal. 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi. 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>). 5. Pemberdayaan UMKM. 6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal. 7. Promosi penanaman modal.	1. Peningkatan iklim penanam modal. 2. Persebaran penanaman modal. 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi. 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>). 5. Pemberdayaan UMKM. 6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal. 7. Promosi dan kerjasama penanaman modal.	1. Perbaikan iklim penanaman modal. 2. Persebaran penanaman modal. 3. Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi. 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>). 5. Pemberdayaan UMKM. 6. Fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal. 7. Promosi penanaman modal.

Sumber: Data sekunder diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan visi, misi, dan arah kebijakan penanaman modal nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Surakarta. Apabila dicermati ketiga Pelayanan Air mempunyai benang merah antar ketiganya, yaitu mewujudkan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Surakarta sebagai negara/daerah yang terbuka untuk investasi. Hal itu tentu tidak mengherankan karena visi penanaman modal Provinsi Jawa Tengah memang merupakan turunan dari visi penanaman modal nasional. Sementara visi penanaman modal Kota Surakarta yang merupakan turunan dari visi penanaman modal Provinsi Jawa Tengah.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk misi dan arah kebijakan penanaman modal. Dimana seperti halnya visi di atas, ada benang merah antar misi penanaman modal nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Surakarta. Dimana ketiganya misi tersebut menekankan pentingnya iklim yang kondusif, ketersediaan infrastruktur, investasi ramah lingkungan, dan pelayanan yang profesional.

Selanjutnya dengan menggunakan visi dan misi penanaman modal Kota Surakarta di atas serta hasil analisis terhadap berbagai kebijakan di bidang penanaman modal yang telah dilakukan dibagian sebelumnya akan disusun visi dan misi penanaman modal yang baru sebagai dasar mengembangkan dokumen *masterplan* investasi Kota Surakarta tahun 2025-2045.

BAB III:

PROFIL INVESTASI KOTA SURAKARTA

3.1. Perkembangan Investasi

Peran dan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian semakin signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Sektor UMKM termasuk sektor yang handal dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi dan keuangan. Hal tersebut belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997, dan krisis keuangan global ditahun 2008. Di mana pada saat itu ada cukup banyak perusahaan besar yang mengalami kesulitan keuangan sebagai dampak dari merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang asing sehingga beberapa diantaranya sampai harus dilikuidasi dan dinyatakan bangkrut.

Hal sebaliknya justru dialami oleh UMKM yang relatif punya daya tahan yang cukup bagus dibandingkan usaha besar. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, pertama, UMKM tidak mempunyai hutang dalam mata uang asing sehingga merosotnya rupiah tidak membuat sektor usaha tersebut mengalami kesulitan keuangan. Kedua, UMKM cenderung lebih banyak menggunakan bahan baku lokal (*local content*), sehingga merosotnya rupiah tidak membuat harga material yang dibutuhkan dalam produksinya menjadi naik cukup tinggi.

Alasan-alasan itulah yang mendorong Pemerintah menempatkan UMKM sebagai salah satu penyangga utama (*main buffer*) perekonomian nasional. Apalagi ada keunggulan yang dimiliki oleh UMKM dibandingkan sektor usaha besar, baik dari tenaga kerja, modal, mulai dari inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil, sampai dengan kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. Oleh sebab itu bukan tanpa alasan jika Pemerintah Kota Surakarta sampai menempatkan Koperasi dan UMK (KUMK) sebagai salah satu kata kunci penting dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Dokumen yang berisi rencana pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tersebut menyebutkan bahwa

“Perlunya peningkatan kecakapan teknis dan pemasaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil”. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memberi perhatian tersendiri terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMK.

Selanjutnya, sesuai dengan fokus utama kajian ini untuk menyusun rencana induk investasi, perkembangan pelaku usaha di Kota Surakarta akan dilihat dari data pertumbuhan investasinya, baik yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar. Pelaku UMK, secara konseptual, biasanya masyarakat daerah bersangkutan, demikian pula dengan pelaku UMK di Kota Surakarta yang sebagian besar adalah masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya.

Table 3.1: Investasi Menurut Jenis Usaha Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

No	Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Mikro	8.374.700	19.783.927	36.860.464	54.055.870	32.159.919	47.365.553	40,03
2	Kecil	113.225.590	171.931.720	184.128.759	151.086.218	288.248.080	833.908.303	51,06
3	Menengah	255.697.190	499.902.877	476.683.119	455.066.480	352.994.010	407.879.768	11,18
4	Besar	2.988.831.956	5.679.262.784	1.127.037.051	2.801.518.748	3.598.060.320	14.705.102.920	76,34
	Jumlah	3.366.129.436	6.370.881.307	1.824.709.393	3.461.727.315	4.560.901.590	16.420.546.521	60,64

Sumber: Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2022.

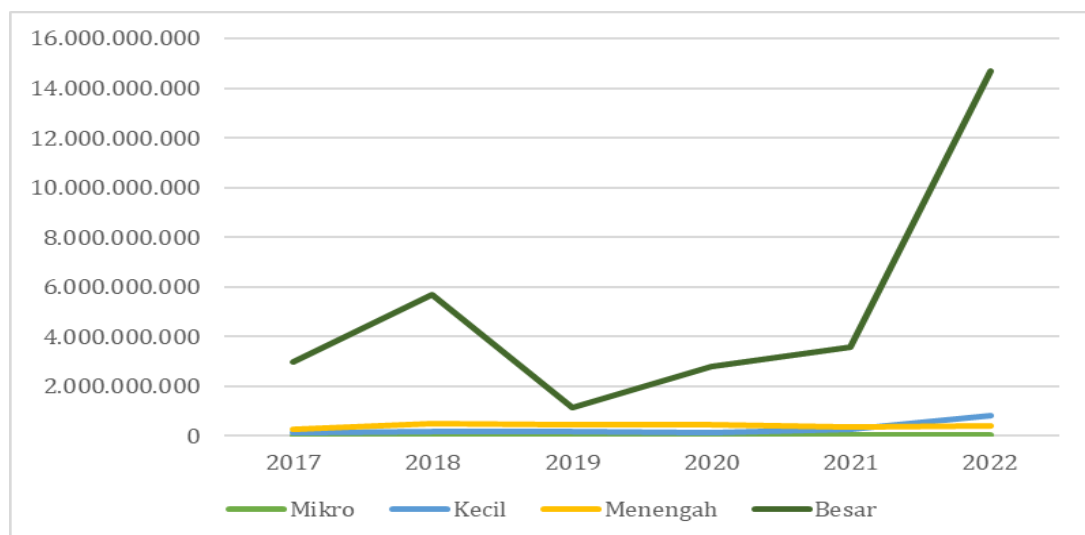
Dari data di atas tampak bahwa kontribusi investasi yang dilakukan oleh usaha besar pada tahun 2017-2022 sangat mendominasi penanaman modal di Kota Surakarta (89,55%). Sementara investasi yang dilakukan oleh usaha menengah pada tahun 2017-2022 memberikan kontribusi sebesar 2,48%. Investasi yang dilakukan oleh usaha kecil pada tahun 2017-2021 memberikan kontribusi sebesar 5,08%. Sedangkan usaha mikro menyumbang kontribusi sebesar 0,29% dari total penanaman modal di Kota Surakarta pada tahun 2017-2022.

Usaha kecil di Kota Surakarta, meskipun memberikan kontribusi paling kecil, namun ternyata mempunyai tingkat pertumbuhan cukup besar dibandingkan sektor usaha lainnya (51,06%). Sementara pertumbuhan penanaman modal yang dilakukan oleh sektor usaha besar menempati urutan

terbesar mencapai 76,34%. Selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan investasi sektor usaha mikro pada periode 2017-2021 (40,03%). Sedangkan tingkat pertumbuhan penanaman modal yang dilakukan oleh usaha menengah paling rendah dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 11,18%.

Tingkat pertumbuhan investasi sektor usaha mikro yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan sektor usaha lainnya tersebut menunjukkan potensi perkembangan jenis usaha tersebut. Apalagi, jika dilakukan penelurusan lebih dalam, tampak bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penanaman modal yang dilakukan oleh sektor usaha mikro di Kota Surakarta terjadi pada tahun 2021 (494.94%). Dimana pada tahun-tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang melanda dunia dan berdampak pada sektor usaha menengah dan besar.

Selanjutnya data perkembangan investasi di Kota Surakarta, baik sektor usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, akan disajikan dalam bentuk grafis. Penyajian data perkembangan investasi dalam bentuk grafik diharapkan dapat mempermudah bagi *stakeholder* dalam memahami informasi yang ditampilkan. Grafik pertumbuhan investasi di Kota Surakarta, baik yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar, disajikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Indikator Ekonomi Kota Surakarta 2022. Diolah

Gambar 3.1 Perkembangan Investasi Menurut Jenis Usaha Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

Grafik di atas menyajikan perkembangan investasi di Kota Surakarta, baik yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar, periode

2017-2022. Dari grafik di atas tampak bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah cenderung tumbuh pada periode observasi, khususnya pada tahun 2022.

Hal itu berbeda dengan sektor usaha besar yang relatif fluktuatif pada tahun 2017-2020. Dimana sektor usaha ini sempat pertumbuhan negatif pada tahun 2019, meski kembali tumbuh secara positif pada tahun 2020-2021. Beberapa pihak mengatakan bahwa menurunnya penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal atau berasal dari dalam negeri sendiri adalah karena pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun politik. Sedangkan faktor eksternal atau berasal dari luar negeri adalah karena diberlakukannya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat dan gejolak harga komoditas yang membuat para investor menjadi cenderung menunggu.

Selanjutnya kajian ini akan menyajikan data perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta berdasarkan status modal, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Sementara PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN bisa berupa usaha perorangan maupun badan usaha, seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan, yang melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia. Data terkait dengan PMA dan PMDN periode 2017-2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Table 3.2: Investasi Berdasarkan Realisasi Kota Surakarta Tahun 2017-2022

No	Klasifikasi	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	PMA						
1.	Proyek	18	32	45	90	96	91
2.	Investasi (Juta Rp)	3.329	89	632,9	2.282,3	1.651,2	85.191,65
3.	TKI	174	48	24	379	35	38
4.	TKA	0	0	0	0	0	0
B.	PMDN						
1.	Proyek	22	32	153	364	1.367	1.128
2.	Investasi (Juta Rp)	29.262	383.299	212.675	391.913	153.236,40	450.421,70
3.	TKI	30	155	1.281	1.476	2.487	931
4.	TKA	2	0	0	3	0	9

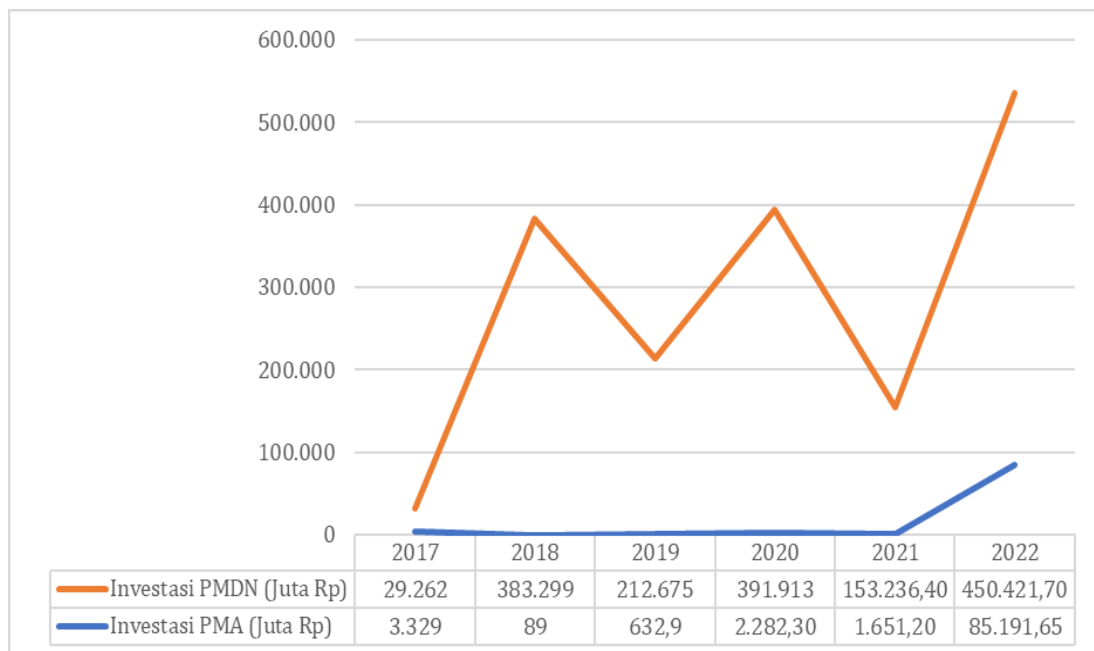
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Perkembangan investasi di Kota Surakarta cenderung fluktuatif pada periode 2017-2022, baik untuk PMA maupun PMDN. Kondisi ini bisa jadi dipengaruhi kondisi dalam negeri maupun luar negeri seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dimana faktor dari dalam negeri yang menyebabkan naik-turunnya investasi adalah karena pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun politik. Sementara faktor luar negeri yang membuat investasi menjadi fluktuasi adalah karena diberlakukannya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat dan gejolak harga komoditas yang membuat para investor menjadi cenderung menunggu.

Investasi yang masuk di Kota Surakarta pada tahun 2017-2022, sebagaimana daerah lain di Indonesia, memang cenderung masih didominasi oleh PMDN (84,09%). Sementara proporsi PMA relatif sangat tidak signifikan terhadap total penanaman modal (15,91%). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta relatif belum menjadi tujuan investasi bagi investor asing.

Peluang investasi di Kota Surakarta yang relatif terbatas menjadi salah satu kemungkinan yang menyebabkan minimnya jumlah PMA yang masuk di daerah tersebut, misalnya di bidang industri pengolahan. Kondisi ini tentu bukan tanpa alasan karena, sebagai wilayah perkotaan, Kota Surakarta tentu cukup kesulitan untuk menyediakan lahan yang cukup luas bagi industri pengolahan untuk membangun pabrik dan fasilitas pendukungnya. Oleh sebab itu mudah dimengerti jika sektor industri pengolahan relatif tidak cukup berkembang seperti sektor ekonomi lainnya.

Nilai investasi yang masuk di Kota Surakarta, baik PMA maupun PMDN, harus diakui relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan total investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 0,74%. Hal ini sebenarnya mudah dipahami mengingat luas wilayah Kota Surakarta juga relatif sangat terbatas dibandingkan dengan total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, jika proporsi investasi Kota Surakarta tersebut diuraikan, berasal dari kontribusi PMA sebesar 0,28% dan PMDN sebesar 0,79%.



Sumber: DPMPTSP Prov Jateng 2023. Diolah

Gambar 3.2 Perkembangan Investasi Menurut Status Modal Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

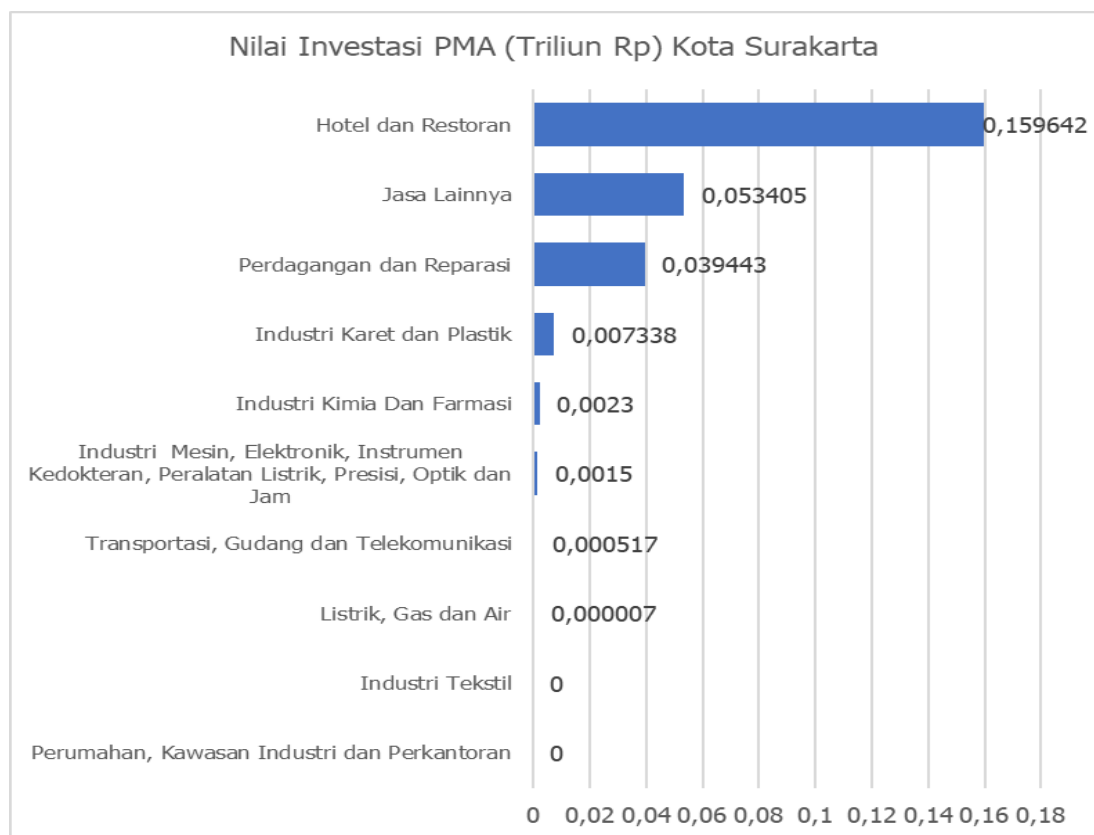
Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa nilai investasi PMDN yang masuk di Kota Surakarta pada tahun 2017-2022 memang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMA. Namun demikian, dibalik tingginya nilai investasi PMDN dibandingkan PMA, bukan berarti fokus Pemerintah Kota Surakarta hanya pada PMDN saja. Pemerintah Kota Surakarta tetap harus memberikan perhatian terhadap perkembangan PMA dengan mencari peluang investasi yang tepat untuk para investor asing tersebut.

Tahap berikutnya dalam kajian ini adalah melakukan analisis terhadap sektor usaha yang paling banyak diminati oleh PMDN maupun PMA di Kota Surakarta, yang dilihat dari nilai investasi yang ditanamkan di daerah ini. Secara kuantitatif, sektor usaha yang menjadi primadona penanaman modal di Kota Surakarta adalah hotel dan restoran. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika jumlah hotel bintang dan non bintang di daerah ini relatif cukup banyak.

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Surakarta ada 166 hotel di daerah ini, yang terbagi atas 4 hotel bintang lima, 7 hotel bintang empat, 17 hotel bintang tiga, 17 hotel bintang dua, 8 hotel bintang satu, 100 hotel nonbintang, 7 *home stay*, dan 6 akomodasi lainnya. Karenanya, dengan luas 44 Km², rata-rata tiap satu kilometer ada 3-4 hotel di Kota Surakarta. Data lain dari

BPS Kota Surakarta menyatakan bahwa hotel bintang empat mempunyai tingkat pertumbuhan paling tinggi dibandingkan kelas hotel lainnya, baik bintang maupun non bintang.

Pertumbuhan hotel di atas ternyata diikuti oleh restoran dan rumah makan di Kota Surakarta. Hal ini bisa dilihat dari data tingkat pertumbuhan restoran dan rumah makan di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir sebelum pandemi covid-19, yaitu sebesar 6.57%. Namun demikian tidak penjelasan lebih lanjut apakah pertumbuhan tersebut dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk makan di restoran dan rumah makan atau makin tingginya tingkat kunjungan wisatawan di Kota Surakarta.



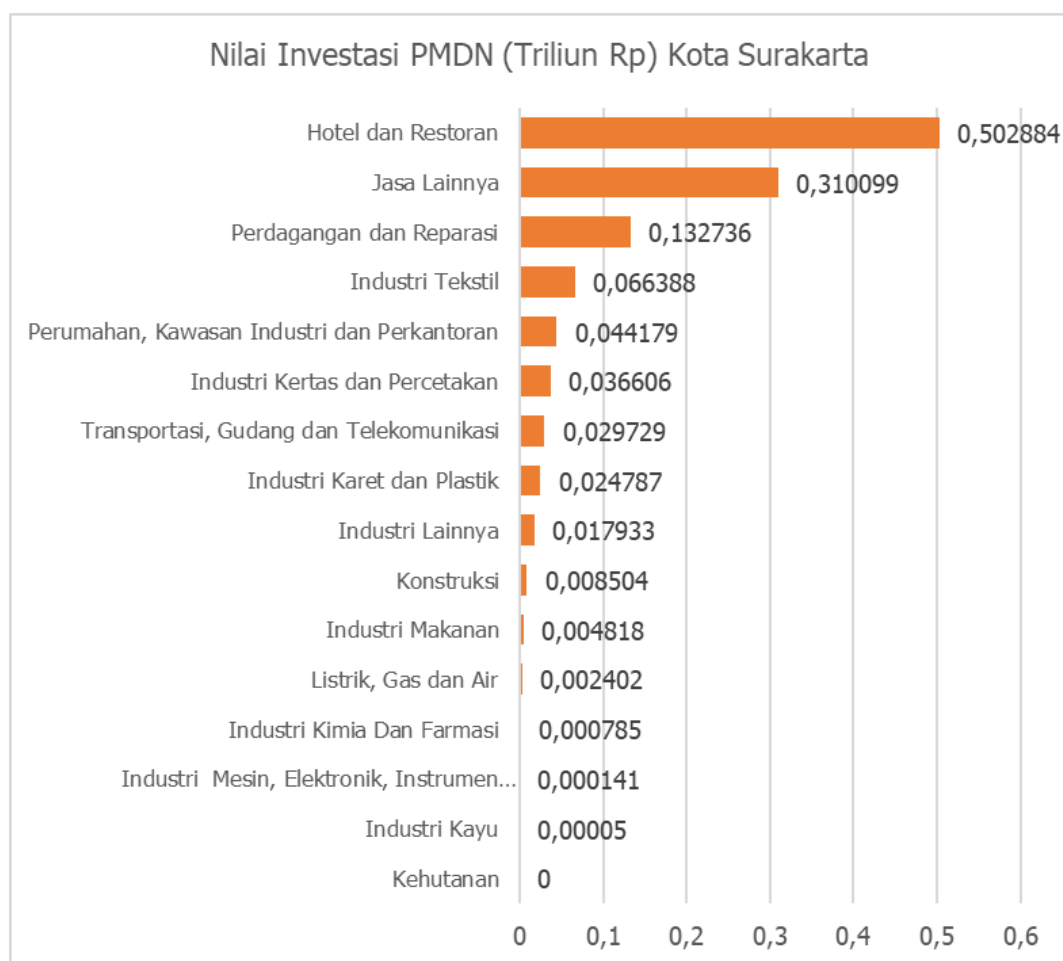
Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20/%20Kota&content_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT, 2023.

Gambar 3.3 Sub Sektor Industri PMA di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagian besar PMA yang masuk di Kota Surakarta berupa usaha hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan sektor usaha hotel dan restoran relatif potensial di Kota Surakarta dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika cukup banyak hotel jaringan

internasional yang beroperasi di daerah ini, seperti Swiss-Belhotel International, Aston International, dan sebagainya.

Tingginya minat PMA untuk menanamkan modalnya pada bisnis hotel dan restoran di Kota Surakarta ternyata diikuti oleh PMDN. Hal ini bisa dilihat dari data BKPM yang menunjukkan tingginya nilai PMDN investasi pada usaha hotel dan restoran dibandingkan sektor usaha lainnya. Bahkan, secara kuantitatif, nilai investasi di bidang perhotelan dan restoran tersebut jauh lebih besar daripada akumulasi nilai investasi untuk seluruh sektor lainnya tersebut. Oleh sebab itu memang tidak bisa diingkari jika bisnis hotel dan restoran dianggap prospektif oleh para investor yang menanamkan dananya di Kota Surakarta.



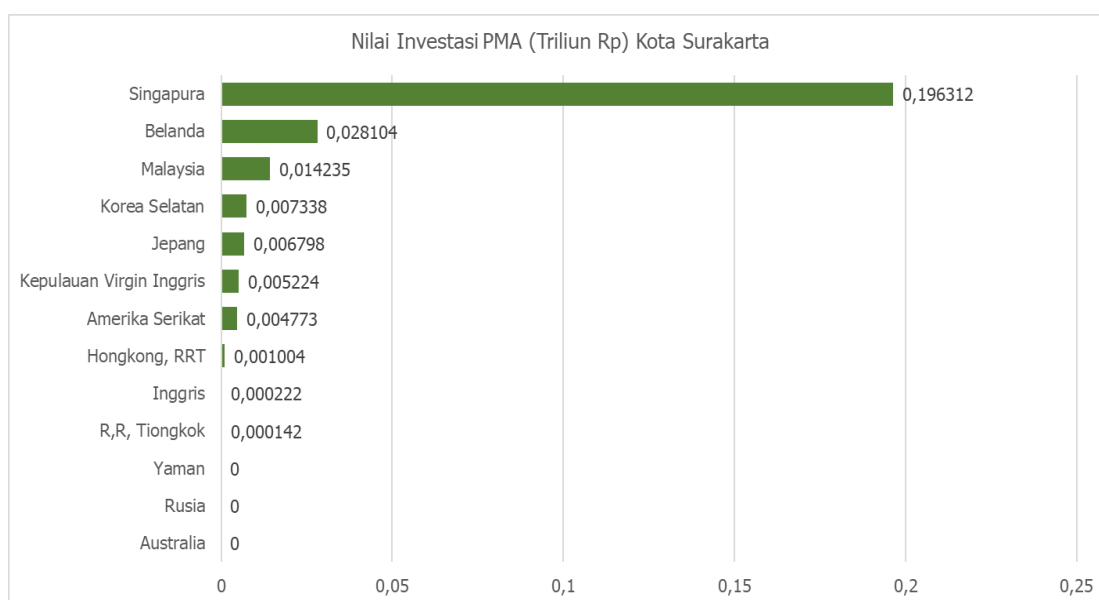
Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20/%20Kota&content_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT, 2023.

Gambar 3.4 Sub Sektor Industri PMDN di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

Tingginya nilai investasi sektor perhotelan dan restoran di Kota Surakarta sejalan dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi daerah ini, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Data yang yang

dilansir oleh Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Surakarta cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019. Apalagi memang cukup banyak *event* atau kegiatan lokal, regional, nasional, dan internasional yang diselenggarakan di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir.

Kunjungan wisatawan di Kota Surakarta memang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sejalan dengan terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia. Namun demikian jumlah wisatawan di Kota Surakarta, khususnya wisnus, kembali meningkat pada tahun 2021 padahal pandemi covid-19 tengah mencapai puncak. Hal ini seakan menunjukkan bahwa masyarakat tetap membutuhkan hiburan dan berwisata dalam kondisi seperti apapun.



Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20/%20Kota&content_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT, 2023.

Gambar 3.5 Negara Asal PMA di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

Grafik di atas menyajikan asal negara PMA yang masuk di Kota Surakarta. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa investasi yang berasal dari Singapura merupakan PMA yang cukup dominan di Kota Surakarta. Negara lain yang cukup memberikan kontribusi terhadap penanaman modal di Kota Surakarta adalah Belanda, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Kepulauan Virgin Inggris, dan Amerika Serikat. Diluar beberapa negara ini sebenarnya masih ada PMA dari negara lain yang masuk di Kota Surakarta meski nilai investasinya relatif kecil.

Perkembangan pariwisata di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir menunjukkan trend positif, bahkan ketika terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022. Hal ini bisa dilihat dari data kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebesar 4.95% per tahun. Namun demikian pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta mengalami penurunan cukup signifikan sejalan dengan terjadinya pandemi covid-19.

Dunia kepariwisataan Kota Surakarta mulai kembali menggeliat pada tahun 2021, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun demikian jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut relatif masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu mudah dipahami karena pandemi covid-19 masih berlanjut pada tahun 2021, bahkan sempat muncul varian virus yang baru yang cukup mengkhawatirkan.

Namun demikian, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, Pemerintah Kota Surakarta dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Salah satunya adalah dengan tetap melanjutkan rencana rehabilitasi sejumlah bangunan di kompleks Pura Mangkunegaran. Dimana proyek ini diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pura Mangkunegaran maupun Kota Surakarta pada umumnya.

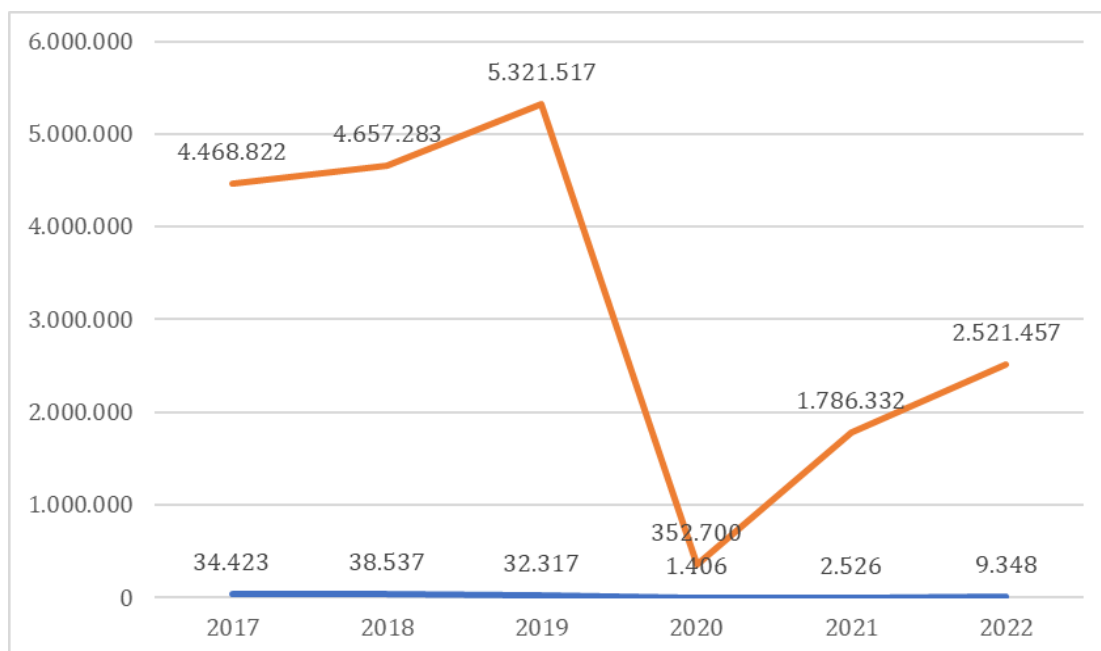
Oleh sebab itu tidak mengherankan jika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Surakarta segera kembali meningkat pada tahun 2021, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kondisi ini tentu cukup menggembirakan bagi pelaku pariwisata di Kota Surakarta sebagai langkah awal untuk melakukan *recovery* mengangkat kembali dunia kepariwisataan daerah tersebut. Apalagi jika mengingat bahwa pada tahun tersebut pandemi relatif belum membaik bahkan cenderung semakin meningkat.

Table 3.3: Perkembangan Pariwisata di Kota Surakarta

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kunjungan Wisatawan	4.503.245	4.695.820	5.353.834	1.420.315	1.788.858	2.530.805
2.	Objek Wisata Unggulan	15	16	20	8	22	14
3.	Restoran	152	158	277	277	691	716
4.	Rumah Makan	690	699	715	450	25	
5.	Hotel Bintang	44	49	49	48	56	56
6.	Hotel Non-Bintang	103	104	93	97	105	101
7.	Home Stay	14	7	39	66	72	
8.	Wisatawan Mancanegara	34.423	38.537	32.317	1.406	2.526	9.348
9.	Wisatawan Nusantara	4.468.822	4.657.283	5.321.517	352.700	1.786.332	2.521.457

Sumber: <https://solodata.surakarta.go.id/rpjmd>, 2023.

Tabel di atas menyajikan beberapa data terkait dengan pariwisata di Kota Surakarta, khususnya jumlah wisatawan, obyek wisata, maupun fasilitas pendukung wisata. Dari data di atas tampak bahwa jumlah wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, cenderung mengalami kenaikan dari periode ke periode sampai dengan tahun 2019. Jumlah wisatawan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sejalan dengan terjadinya pandemi covid-19, meski angka tersebut kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2021.



Sumber: solodata.surakarta.go.id, 2023. Diolah

Gambar 3.6 Perbandingan Wisawatan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di Kota Surakarta

Grafik di atas menyajikan perbandingan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berkunjung periode 2017-2022. Dari grafik tersebut tampak bahwa jumlah wisatawan mancanegara relatif masih sangat sedikit dibandingkan dengan wisatawan nusantara, yaitu sekitar 0,37%. Angka ini tentu sangat rendah mengingat rasio antara wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara secara nasional pada periode tersebut mencapai 2,73%. Apalagi jika perbandingan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara itu dibandingkan dengan rasio antara wisatawan mancanegara dengan wisatawan nusantara Yogyakarta yang mencapai 6,37%.

Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Surakarta di atas, meski secara kuantitatif cukup banyak, hanya sebesar 0,34% dari total wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara secara nasional. Bahkan jika dilakukan penelusuran lebih lanjut akan tampak bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Surakarta baru sekitar 0,17% dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Angka ini sebenarnya relatif sangat kecil mengingat Kota Surakarta mempunyai banyak bangunan cagar budaya era kolonial atau swapraja yang menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan mancanegara, seperti Kraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran.

Table 3.4: Perbandingan Jumlah Wisatawan Kota Surakarta dan Nasional

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Kota Surakarta						
1.	Wisatawan Mancanegara	34.423	38.537	32.317	1.406	2.526	9.348
2.	Wisatawan Nusantara	4.468.822	4.657.283	5.321.517	1.418.909	1.786.332	2.521.457
	Total	4.503.245	4.695.820	5.353.834	1.420.315	1.788.858	2.530.805
B.	Nasional						
1.	Wisatawan Mancanegara	14.039.799	15.810.305	16.106.954	4.052.923	1.557.530	5.471.277
2.	Wisatawan Nusantara	270.822.003	303.403.888	722.158.733	524.571.392	603.020.000	734.864.693
	Total	284.861.802	319.214.193	738.265.687	528.624.315	604.577.530	740.335.970

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/16/1189/1/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara.html>, 2023.

Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Surakarta ternyata relatif masih sangat kecil dibanding total

wisatawan secara nasional. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam membangun dan mengembangkan dunia kepariwisataan mengingat potensi yang dimiliki daerah ini relatif cukup besar sejalan dengan keberadaan dua ikon wisatanya, yaitu Kraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Apalagi saat ini telah ada beberapa obyek wisata lain di Kota Surakarta yang kebetulan tidak banyak dimiliki daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu KA Kluthuk Jaladara dan Solo Safari.

Tantangan lain yang mestinya juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta adalah lamanya tinggal (*length of stay*) para wisatawan di daerah tersebut. Dimana lama tinggal wisatawan di hotel-hotel Kota Surakarta pada tahun 2022 baru mencapai 1,30 hari, meski angka sudah meningkat dari 1,25 hari pada tahun 2021 ketika pandemi covid-19 masih terjadi di seluruh dunia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, lama menginap capaian tersebut tidak jauh berbeda dengan lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta pada periode sebelum pandemi covid-19, khususnya pada tahun 2019.

Table 3.5: Lama Tinggal Wisatawan di Kota Surakarta

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wisatawan Mancanegara (hari)	N.A	N.A	2,13	2,50	2,51	2,51
2.	Wisatawan Nusantara (hari)	N.A	N.A	1,60	1,50	1,25	1,30

Sumber: BPS Kota Surakarta 2023. Diolah

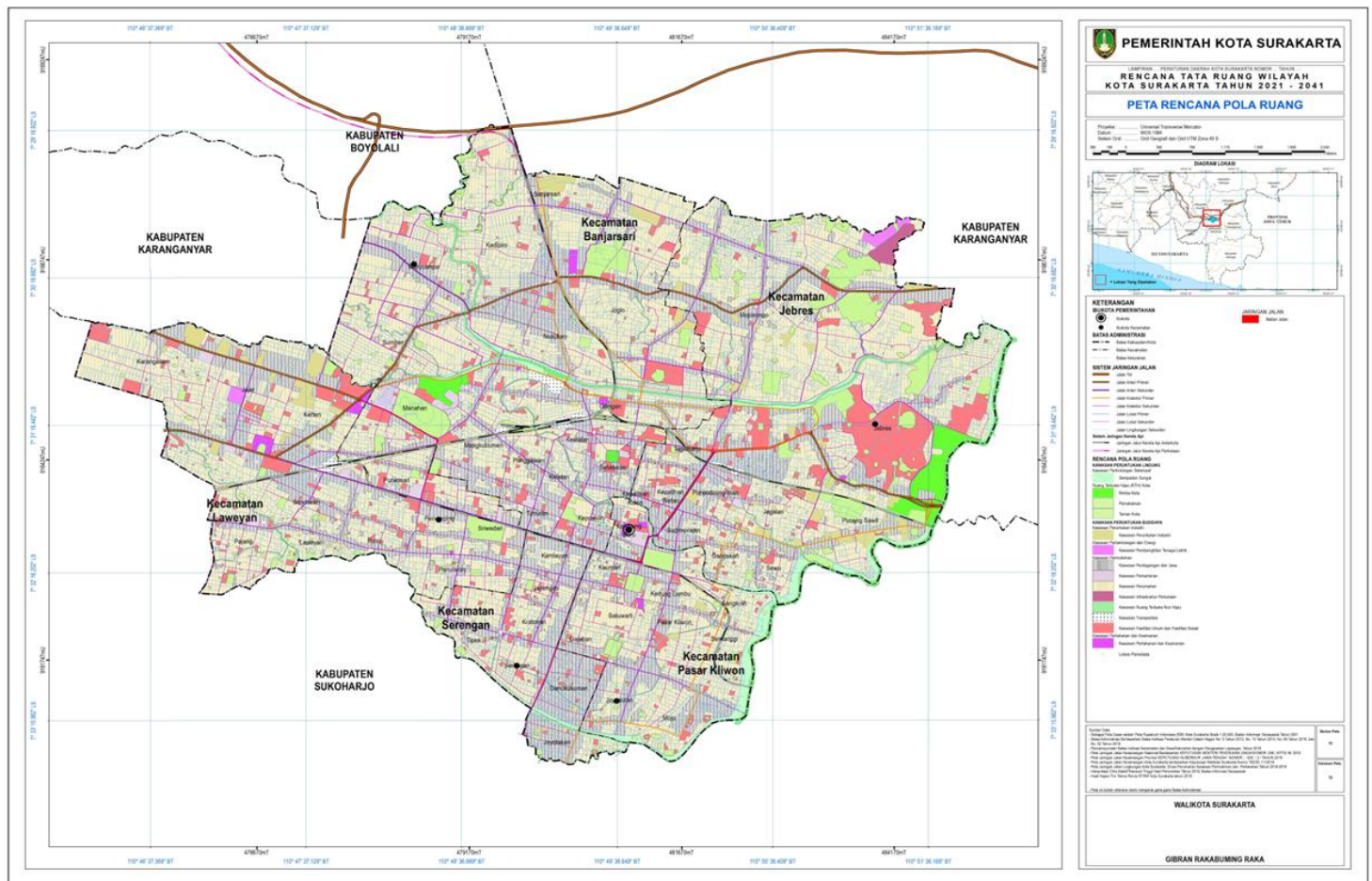
Keterangan: N.A : Not Available/Data tidak tersedia.

3.2. Kebijakan Tata Ruang

Pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mendukung pertumbuhan penanaman modal di daerahnya, khususnya peraturan yang terkait dengan peruntukan lahan untuk zona pengembangan investasi. Salah satu regulasi yang mengatur zona peruntukan pengembangan investasi adalah **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031**. Regulasi ini menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa,

pendidikan, pariwisata, serta olah raga. Dimana ada dua kebijakan serta strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota di atas, yaitu pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang.

Regulasi di atas direvisi dengan **Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041**. Regulasi ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta. Selain itu ada beberapa aspek yang diatur dalam regulasi ini, yaitu sebagai dasar dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.



Gambar 3.7 Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta

Berdasarkan peta RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman, bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman dan lain - lain. Sebagian besar penggunaan

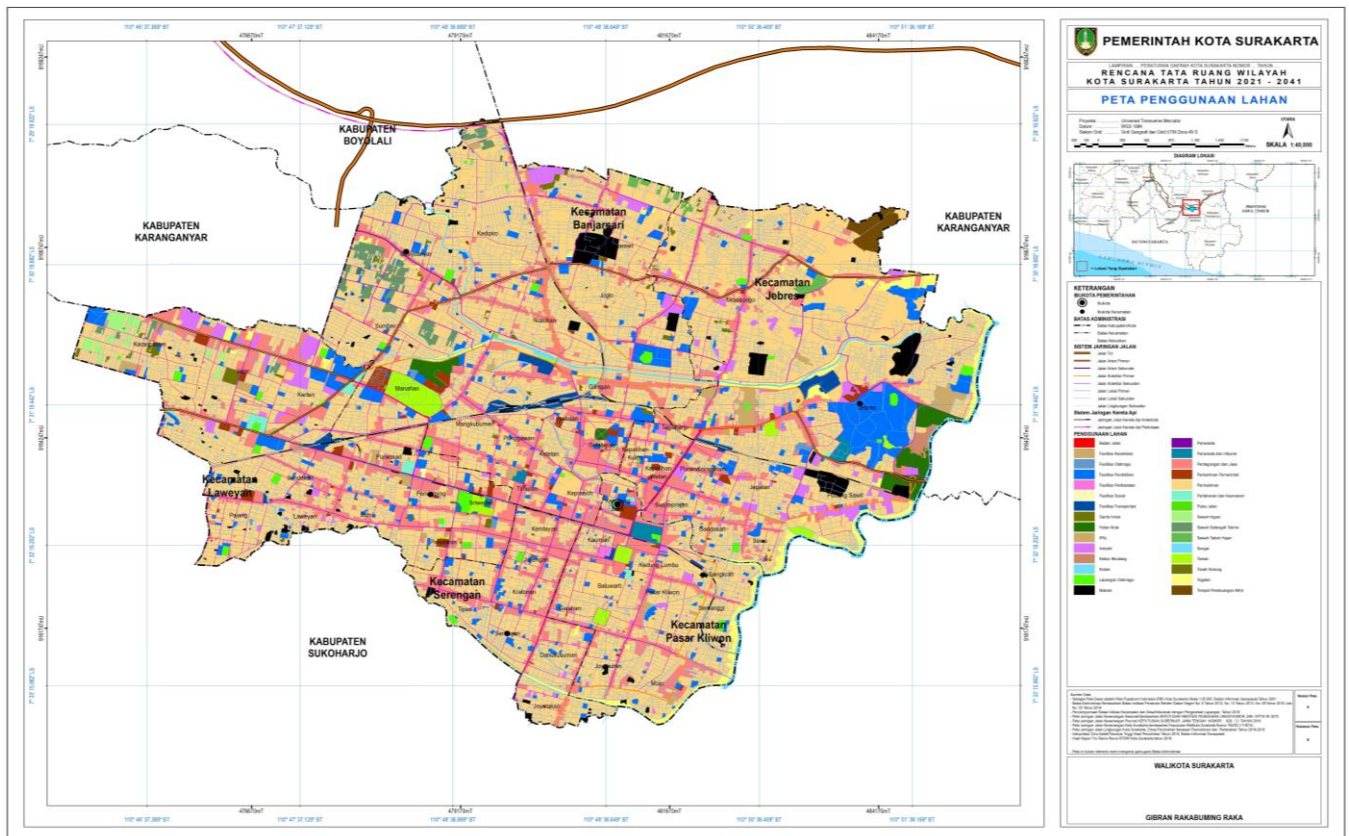
lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 Ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

Table 3.6: Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Badan Jalan	52,44
2	Fasilitas Kesehatan	44,41
3	Fasilitas Olahraga	5,39
4	Fasilitas Pendidikan	269,67
5	Fasilitas Peribadatan	20,62
6	Fasilitas Sosial	0,74
7	Fasilitas Transportasi	38,07
8	Gardu Induk	3,36
9	Hutan Kota	40,19
10	Industri	99,44
11	IPAL	1,46
12	Kebun Binatang	8,08
13	Lapangan Olahraga	32,96
14	Makam	77,57
15	Pariwisata dan Hiburan	16,80
16	Perdagangan dan Jasa	724,60
17	Perkantoran Pemerintah	47,27
18	Permukiman	2874,88
19	Pertahanan dan Keamanan	12,86
20	Pulau Jalan	0,595
21	Sawah Irigasi	15,47
22	Sawah Setengah Teknis	37,30
23	Sawah Tadah Hujan	10,60
24	Sungai	66,14
25	Taman	50,23
26	Tanah Kosong	17,872
27	Tegalan	85,08
28	Tempat Pembuangan Akhir	18,23
	Jumlah	4.672,33

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Berikut ini adalah peta penggunaan lahan eksisting Kota Surakarta :



Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Gambar 3.8 Penggunaan Lahan Kota Surakarta

Pola pemanfaatan lahan di atas pada dasarnya biasanya terjadi di daerah perkotaan di Indonesia, dimana sebagian besar lahannya digunakan sebagai kawasan permukiman, jasa, dan perdagangan. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pertumbuhan dan perkembangan industri justru terjadi di wilayah sekitar perkotaan yang menjadi daerah penyangga (buffer zone), demikian pula di Kota Surakarta. Alasan inilah yang membuat industri (manufaktur) lebih banyak tumbuh dan berkembang di wilayah sekitar Kota Surakarta, khususnya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika, secara kuantitatif, jumlah industri yang ada di Kota Surakarta tidak sebanyak jenis usaha lainnya. Selain itu, dari data yang ada, sebagian besar usaha di daerah ini dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil (86,46%). Sementara jumlah usaha menengah sebanyak 9,82%

dari total usaha yang ada di Kota Surakarta. Sedangkan jumlah entitas yang dikategorikan sebagai usaha besar sebanyak 3,72%.

Tabel 3.7: Jumlah Usaha di Kota Surakarta (Unit)

No	Jenis Industri	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari	Laweyan	Serengan	Total
1	Industri Tekstil	56	20	26	39	22	163
2	Industri Kayu	0	7	7	4	0	18
3	Industri Kertas & Percetakan	5	16	12	18	4	55
4	Industri Logam Mesin & Elektronik	11	22	15	26	17	91
5	Industri Makanan	9	35	64	32	20	160
6	Property	7	13	14	8	9	51
7	Jasa Keuangan	9	11	10	18	14	62
8	Jasa Pariwisata	7	7	15	20	0	49
9	Jasa & Industri Lainnya	131	358	494	277	174	1434
	Jumlah	235	489	657	442	260	2083

Sumber: <https://investasi.surakarta.go.id/v1/peta>, 2023.

Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 telah mengatur peruntukan kawasan di Kota Surakarta untuk kegiatan tertentu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, khususnya bidang usaha, sebagai berikut:

1. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, terdiri atas:

- Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi:

- Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
- Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

- f. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan sentra Industri Kecil dan Menengah dilakukan dimasing-masing Kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

3. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan dan Istana Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran. Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon.

Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan dan wisata belanja lainnya.

Pengembangan wisata kuliner dikembangkan di seluruh kecamatan. Untuk menunjang pariwisata dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya dan sungai. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bengawan Solo

4. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan sektor informal, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.369 ha yang tersebar di Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 (empat ratus

delapan puluh lima) hektar; Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar; Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar; Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 (enam ratus enam puluh tujuh) hektar; dan Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 (delapan ratus empat puluh dua) hektar.

- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.162 ha yang tersebar di Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar; Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar; Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar; Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar; dan Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektar.
- c. Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar; Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar; Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar.
- d. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 340 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga.
- e. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 270 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan sebagaimana dengan luas kurang lebih 46 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 119 ha yang

tersebar di Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar; Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar; Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektar.

- g. Kawasan Transportasi. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar; Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar; dan Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.
- h. Kawasan Infrastruktur Perkotaan. Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 12 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;
 - Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/ Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
 - Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
 - Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon
 - Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon
 - Detasemen Perbekalan dan Angkutan IV di Kecamatan Kecamatan Banjarsari; dan
 - Datasemen Peralatan IV Angkatan Darat di Kecamatan Pasar Kliwon.

Berdasarkan proporsi peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah kota Surakarta, aktivitas perkotaan yang mendominasi adalah aktivitas perdagangan jasa dan pariwisata. Perdagangan, jasa dan pariwisata terletak di pusat kota dengan model kompaksi perkotaan yang baik. Hal ini merupakan modal ruang yang baik untuk mewujudkan fungsi kota jasa perdagangan yang mampu bersaing pada skala global.

3.3. Potensi Investasi

Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta ini disusun sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang berisi kajian eksisting wilayah, perkembangan investasi, kebutuhan investasi, kebutuhan infrastruktur penunjang investasi, dan sebagainya. Itu sebabnya mengapa *masterplan* investasi sering disebut sebagai wadah hukum untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan investasi, oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil yang komprehensif, kajian ini akan mengidentifikasi sektor ekonomi yang selama ini menjadi sektor unggulan di Kota Surakarta. Dalam kajian ini identifikasi terhadap sektor investasi unggulan akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan berbasis Pendapatan Daerah Regional Daerah (PDRB), yaitu analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share*.

Analisis *location quotient* pada dasarnya merupakan metode yang digunakan untuk potensi sebuah daerah, termasuk dibidang investasi. Dimana analisis ini dilakukan dengan menentukan satu atau beberapa sektor ekonomi di daerah tersebut menjadi sektor basis atau (*leading sector*). Secara konseptual sektor basis akan ditentukan dengan membandingkan peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar.

Sementara analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan satu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas, oleh sebab itu memang ada perbedaan antara hasil yang diperoleh dari analisis LQ dan

analisis *shift share*, dimana output analisis LQ digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan sektor unggulan (basis) dari suatu wilayah tertentu. Sementara output dari analisis *shift share* akan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja atau produktifitas kerja perekonomian sebuah daerah, yaitu dengan cara membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (tingkat regional atau nasional).

Kedua metode analisis ini memang bisa digunakan secara bersama-sama karena ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Apabila di suatu daerah ada sektor yang menjadi basis maka analisis *shift share* akan digunakan untuk membandingkan keunggulan komparatif sektor tersebut dengan sektor yang sama dari daerah yang cakupan skalanya lebih besar, seperti perbandingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Namun jika sebuah produk tertentu sudah menjadi unggulan di tingkat provinsi maka bisa dipastikan bahwa produk tersebut menjadi sektor basis, serta unggulan di daerahnya.

Selanjutnya, mengingat kedua pendekatan di atas menggunakan data-data PDRD sebagai dasar analisis maka akan disajikan PDRB Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 3.8: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136,489.99	141,975.97	146,185.36	149,001.94	152,191.74	155,546.81
2.	Pertambangan dan Penggalian	530.74	200.92	185.49	174.08	148.36	116.56
3.	Industri Pengolahan	2,450,405.47	2,556,984.70	2,707,251.45	2,598,563.54	2,757,755.01	2,915,401.41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	72,109.52	75,706.00	79,648.25	80,914.24	86,460.08	91,174.06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	53,818.10	56,315.73	58,986.31	60,886.07	58,270.83	56,546.88
6.	Konstruksi	8,273,638.75	8,688,085.26	9,088,768.34	8,909,743.46	8,971,026.38	9,067,626.56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	7,432,993.59	7,800,993.15	8,205,089.06	7,779,824.28	8,227,240.68	8,605,954.38
8.	Transportasi dan Pergudangan	908,893.25	960,615.10	1,030,897.73	386,201.81	399,568.57	924,542.36

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,605,808.59	1,672,613.64	1,759,781.79	1,474,706.35	1,599,051.16	2,296,552.48
10.	Informasi dan Komunikasi	4,368,733.75	4,897,768.51	5,393,512.88	6,455,883.90	6,951,672.31	7,098,628.47
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,094,706.81	1,131,379.74	1,181,579.42	1,206,749.40	1,234,323.51	1,261,340.69
12.	Real Estate	1,398,274.02	1,433,835.71	1,476,560.66	1,482,893.04	1,533,565.90	1,622,052.68
13.	Jasa Perusahaan	234,951.42	256,239.26	280,665.53	256,718.39	262,333.82	280,145.88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	1,682,112.54	1,732,862.82	1,800,423.00	1,761,678.74	1,758,276.59	1,796,912.24
15.	Jasa Pendidikan	1,333,726.85	1,411,139.38	1,495,586.53	1,481,236.98	1,483,178.66	1,532,096.13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	328,182.40	357,001.84	379,101.04	425,010.18	430,202.70	446,538.85
17.	Jasa Lainnya	310,104.68	332,182.93	356,884.83	305,778.92	305,981.96	324,811.93
	PDRB	31,685,480.46	33,505,900.66	35,441,107.67	34,815,965.32	36,211,248.26	38,475,988.36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023.

1. Analisis Location Quotient

Analisis LQ pada dasarnya merupakan pendekatan yang menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas/regional/nasional. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk koefisien *LQ* dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja hasil produksi, nilai tambah, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Kemudian menentukan sektor basis dan non basis adalah dengan melihat sektor yang dominan dalam perekonomian sebagai sektor basis, misalnya industri pengolahan atau konstruksi, dan sisanya sebagai sektor non basis. Namun untuk cara yang terakhir ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai perekonomian di daerah tersebut.

Metode analisis yang akan digunakan untuk mengetahui dan menentukan sektor-sektor basis atau sektor yang menghasilkan *monetary inflow* lebih besar bagi daerah adalah analisis LQ dengan formula sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{NTB_i^r / NTB_i^n}{PDRB^r / PDRB^n}$$

Keterangan: LQ_i	= Indeks LQ sektor i di Kab/Kota r .
NTB_{r_i}	= Nilai tambah bruto sektor i di Kab/Kota r .
NTB_{n_i}	= Nilai tambah bruto sektor i di Provinsi.
$PDRB_r$	= Produk Domestik Regional Bruto di Kab/Kota.
$PDRB_n$	= Produk Domestik Regional Bruto Provinsi.

Dengan persamaan ini dapat diketahui apakah sektor ini merupakan sektor basis atau non basis, yaitu jika:

- $LQ > 1$: berarti sektor tersebut merupakan sektor basis.
- $LQ < 1$: berarti sektor tersebut merupakan sektor non basis.
- $LQ = 1$: berarti sektor tersebut merupakan sektor swasembada.

Secara konsepsional, tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah disebabkan karena adanya kegiatan produksi masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan yang dapat dijual (diekspor) ke wilayah/daerah lainnya. Konsep ini dapat dijelaskan melalui konsep basis ekonomi (*economic base*). Pada dasarnya kegiatan dalam suatu daerah dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh bersangkutan bahkan harus mengimpor dari daerah lain. Dengan demikian

pertumbuhan sektor-sektor (basis dan non basis) ini sangat dipengaruhi oleh pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya dengan menggunakan data PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2022 yang sudah disajikan dalam bagian sebelumnya akan dihitung nilai LQ untuk setiap sektor ekonomi di Kota Surakarta. Hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9: Indeks LQ Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Industri Pengolahan	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.07	2.05	2.03	2.03	2.05	2.05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.40	2.40	2.40	2.15	2.05	2.30
6.	Konstruksi	2.48	2.46	2.49	2.32	2.28	2.42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	1.60	1.59	1.55	1.54	1.53	1.57
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.84	0.83	0.45	0.45	0.60	0.67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.53	1.47	1.33	1.35	1.64	1.49
10.	Informasi dan Komunikasi	3.02	2.97	3.05	3.07	3.04	3.03
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.24	1.25	1.23	1.23	1.24	1.24
12.	Real Estate	2.26	2.20	2.19	2.21	2.20	2.23
13.	Jasa Perusahaan	1.99	1.97	1.92	1.89	1.89	1.95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	2.02	2.01	1.98	1.97	1.97	2.00
15.	Jasa Pendidikan	1.09	1.07	1.05	1.05	1.06	1.07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.22	1.21	1.25	1.25	1.26	1.24
17.	Jasa Lainnya	0.59	0.57	0.53	0.52	0.49	0.55

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan indeks LQ Kota Surakarta tahun 2017-2022 untuk seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut. Hasilnya menunjukkan ada beberapa sektor ekonomi yang menjadi sektor basis karena nilai indeks LQ lebih besar daripada satu. Selain itu hasil analisis juga menunjukkan ada beberapa sektor ekonomi lain yang menjadi sektor non basis karena nilai indeks LQ bernilai kurang dari satu.

- a. Sektor basis Kota :
Surakarta
- Pengadaan listrik dan gas.
 - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
 - Konstruksi.
 - Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil.
 - Penyediaan akomodasi dan makan minum.
 - Informasi dan komunikasi.
 - Jasa keuangan dan asuransi.
 - Real estate.
 - Jasa perusahaan.
 - Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial.
 - Jasa pendidikan.
 - Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- b. Sektor non basis :
Kota Surakarta
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - Pertambangan dan penggalan.
 - Industri pengolahan.
 - Transportasi dan pergudangan.
 - Jasa lainnya.

Dari analisis LQ yang telah dilakukan di atas, ada beberapa sektor ekonomi yang menjadi sektor non basis, misalnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tentu bukan tanpa alasan mengapa beberapa sektor tersebut menjadi sektor tersebut, salah satunya adalah karena Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang sebagian besar kawasannya diperuntukkan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Hingga hampir tidak ada lahan yang bisa digunakan sebagai kawasan pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalan.

Kota Surakarta juga relatif tidak begitu menonjol sebagai kawasan industri pengolahan karena industri semacam ini biasanya memerlukan lahan yang relatif luas untuk membangun pabrik dan fasilitas pendukungnya. Padahal wilayah Kota Surakarta sudah relatif dipenuhi dengan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Oleh sebab itu mudah dipahami jika sebagian besar pelaku industri memilih kawasan-kawasan di sekitar Kota Surakarta untuk mendirikan pabriknya, seperti Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo.

Industri transportasi dan pergudangan juga tidak menjadi sektor basis di Kota Surakarta karena sebagai daerah dengan wilayah yang relatif terbatas, *demand* terhadap layanan transportasi untuk kebutuhan pribadi maupun usaha menjadi terbatas. Masyarakat cukup mudah memenuhi kebutuhan transportasinya dengan kendaraan pribadinya. Demikian pula dengan para pengusaha yang cukup mampu memenuhi kebutuhan transportasi dengan armada angkutan yang dimiliki secara pribadi.

Hal yang sama juga terjadi untuk layanan pergudangan di Kota Surakarta. Sejalan dengan terbatasnya industri pengolahan di daerah ini membuat *demand* gudang untuk menyimpan barang menjadi relatif terbatas. Apalagi para pelaku industri perdagangan biasanya juga telah mempunyai gudang sendiri untuk menyimpan barang-barang dagangannya.

2. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Secara konseptual, ada tiga komponen *shift share* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis tersebut, yaitu:

- a. **National/Regional Share.** *National share* digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan

agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

- b. **Proportional Shift.** *Proportional shift* digunakan untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
 - *Proportional shift* < 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki pertumbuhan yang lambat.
 - *Proportional shift* > 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki pertumbuhan yang cepat.
- c. **Differential Shift.** *Differential shift* digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.
 - *Differential shift* < 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki daya saing yang rendah.
 - *Differential shift* > 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki daya saing yang tinggi.

Tabel 3.10: Analisis Shift Share Kota Surakarta Tahun 2010-2022 (Juta Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Regional Share	Proportional Shift	Defferential Shift	Total Kinerja
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	73,756.26	(40,001.60)	14,166.35	47,921.00
2.	Pertambangan dan Penggalian	410.52	(69.57)	(823.43)	(482.48)
3.	Industri Pengolahan	1,121,188.06	(124,964.99)	283,130.37	1,279,353.44
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	32,251.56	10,528.32	1,332.41	44,112.29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	33,102.27	(14,503.16)	(10,355.37)	8,243.74
6.	Konstruksi	4,153,066.19	7,989.56	(1,153,621.70)	3,007,434.05
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	3,504,196.99	(46,620.03)	35,020.83	3,492,597.79
8.	Transportasi dan Pergudangan	388,005.58	324,538.79	(354,183.33)	358,361.04
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	716,092.87	361,535.69	173,994.60	1,251,623.16
10.	Informasi dan Komunikasi	1,671,685.28	3,366,949.31	(379,344.70)	4,659,289.89

No	Sektor Ekonomi	Regional Share	Proportional Shift	Defferential Shift	Total Kinerja
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	536,621.15	(61,532.87)	3,209.86	478,298.15
12.	Real Estate	621,910.55	180,704.46	(88,059.95)	714,555.06
13.	Jasa Perusahaan	93,456.98	80,060.80	(29,745.20)	143,772.59
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	950,887.85	(589,335.01)	47,815.06	409,367.91
15.	Jasa Pendidikan	538,488.73	578,119.94	(370,280.27)	746,328.40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,566.70	125,540.40	12,203.66	263,310.76
17.	Jasa Lainnya	152,453.56	36,049.68	(86,152.95)	102,350.29
	PDRB	14,713,141.12	4,194,989.73	(1,901,693.77)	17,006,437.08

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan *regional share*, *proportional share*, *defferential share*, dan total kinerja Kota Surakarta yang dihitung dengan metode *shift share*. Dimana atas hasil perhitungan analisis *shift share* tersebut dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Regional Share : Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (*regional growth effect/regional share*) terhadap perekonomian Kota Surakarta menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output sebesar Rp 14,713,141.12 (Juta). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surakarta tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah.
- Sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kota Surakarta dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah adalah sektor konstruksi dengan angka komponen paling tinggi (*regional share*) dari seluruh sektor (Rp 4,153,066.19 Juta). Kemudian sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat di Kota Surakarta dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah

yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar Rp 410.52 Juta.

- b. Proportional Share : Pergeseran proposional (*proportional shift*) secara keseluruhan atau total perekonomian Kota Surakarta tergolong sudah maju. Hal ini dapat dilihat dengan nilai *proportional shift* yang positif sebesar Rp 4,194,989.73 Juta. Ada sebelas sektor yang sudah tergolong maju atau cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah karena nilai *proposional shif* yang positif, yaitu sektor (a) pengadaan listrik dan gas, (b) konstruksi, (c) transportasi dan pergudangan, (d) penyediaan akomodasi dan makan minum, (e) informasi dan komunikasi, (f) real estate, (g) jasa perusahaan, (h) jasa pendidikan, (i) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta (j) jasa lainnya.

Sedangkan ketujuh sektor lainnya dikategorikan mempunyai pertumbuhan yang lambat kemajuan dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah, yaitu sektor (a) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (b) pertambangan dan penggalian, (c) industri pengolahan, (d) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (e) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, (f) jasa keuangan dan asuransi, serta (g) administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial.

- c. Defferential Share : Pergeseran diferensial (*differential shift*) secara keseluruhan atau total maka perekonomian Kota

Surakarta tidak memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang tinggi atau kuat terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada nilai *differential shift* yang negatif, yaitu -Rp 1,901,693.77 Juta. Analisis secara sektoral menunjukkan ada cukup banyak sektor ekonomi di Kota Surakarta memiliki nilai *differential shift* negatif, yaitu sektor (a) pertambangan dan penggalan, (b) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (c) konstruksi, (d) transportasi dan pergudangan, (e) informasi dan komunikasi, (f) real estate, (g) jasa perusahaan, (h) jasa pendidikan, serta (i) jasa lainnya.

Hal itu dapat diartikan bahwa sektor-sektor ekonomi di atas tidak memiliki daya saing yang kuat atau memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

- d. Total Kinerja : Perekonomian Kota Surakarta mendapatkan hasil yang sangat positif terhadap nilai total kinerja selama kurun waktu 2010-2021 karena mengalami kenaikan nilai absolut serta keunggulan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 17,006,437.08 Juta.

3. Analisis Tipologi Klasen

Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi daerah ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi

daerah dan kontribusi PDRB daerah. Tujuan penelitian adalah untuk melihat potensi sektor ekonomi di Kota Surakarta.

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $s_i > s$. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.
- b. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i < g$ dan $s_i > s$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.
- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $s_i < s$. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

- d. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Oleh sebab itu kajian ini akan menyajikan data laju pertumbuhan dan pangsa PDRB Kota Surakarta periode 2017-2022 yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis Tipologi Klasen, sebagai berikut:

Tabel 3.11: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.02	2.96	1.93	2.14	2.20	2.65
2.	Pertambangan dan Penggalian	(62.14)	(7.68)	(6.15)	(14.77)	(21.44)	(22.44)
3.	Industri Pengolahan	4.35	5.88	(4.01)	6.13	5.72	3.61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.99	5.21	1.59	6.85	5.45	4.82
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.64	4.74	3.22	(4.30)	(2.96)	1.07
6.	Konstruksi	5.01	4.61	(1.97)	0.69	1.08	1.88
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	4.95	5.18	(5.18)	5.75	4.60	3.06
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.69	7.32	(62.54)	3.46	131.39	17.06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.16	5.21	(16.20)	8.43	43.62	9.04
10.	Informasi dan Komunikasi	12.11	10.12	19.70	7.68	2.11	10.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.35	4.44	2.13	2.28	2.19	2.88
12.	Real Estate	2.54	2.98	0.43	3.42	5.77	3.03
13.	Jasa Perusahaan	9.06	9.53	(8.53)	2.19	6.79	3.81
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	3.02	3.90	(2.15)	(0.19)	2.20	1.36
15.	Jasa Pendidikan	5.80	5.98	(0.96)	0.13	3.30	2.85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.78	6.19	12.11	1.22	3.80	6.42
17.	Jasa Lainnya	7.12	7.44	(14.32)	0.07	6.15	1.29
	PDRB	5.75	5.78	(1.76)	4.01	6.25	4.01

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022 yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis

Tipologi Klasen. Dimana analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebagai tolok ukurnya. Namun demikian, karena dalam analisis Tipologi Klasen juga diperlukan data kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, kajian ini juga akan menyajikan kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta.

Tabel 3.12: Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0042	0.0041	0.0043	0.0042	0.0040	0.0042
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.	Industri Pengolahan	0.0763	0.0764	0.0746	0.0762	0.0758	0.0759
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.0023	0.0022	0.0023	0.0024	0.0024	0.0023
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0016
6.	Konstruksi	0.2593	0.2564	0.2559	0.2477	0.2357	0.2510
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	0.2328	0.2315	0.2235	0.2272	0.2237	0.2277
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.0287	0.0291	0.0111	0.0110	0.0240	0.0208
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.0499	0.0497	0.0424	0.0442	0.0597	0.0492
10.	Informasi dan Komunikasi	0.1462	0.1522	0.1854	0.1920	0.1845	0.1721
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.0338	0.0333	0.0347	0.0341	0.0328	0.0337
12.	Real Estate	0.0428	0.0417	0.0426	0.0424	0.0422	0.0423
13.	Jasa Perusahaan	0.0076	0.0079	0.0074	0.0072	0.0073	0.0075
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	0.0517	0.0508	0.0506	0.0486	0.0467	0.0497
15.	Jasa Pendidikan	0.0421	0.0422	0.0425	0.0410	0.0398	0.0415
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.0107	0.0107	0.0122	0.0119	0.0116	0.0114
17.	Jasa Lainnya	0.0099	0.0101	0.0088	0.0084	0.0084	0.0091
	PDRB	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta di atas selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis Tipologi Klasen. Analisis dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta dengan Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor

ekonomi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan sektor ekonomi di Kota Semarang sesuai dengan klasifikasi, apakah sebagai sektor yang maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, atau sektor tertinggal.

Tabel 3.13: Matriks Tipologi Klasen

Kuadran I Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Kuadran II Sektor Maju, Tapi Tertekan
• Pengadaan listrik dan gas. • Penyediaan akomodasi dan makan minum. • Informasi dan komunikasi. • Jasa keuangan dan asuransi. • Real estate. • Jasa perusahaan. • Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	• Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. • Konstruksi. • Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. • Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. • Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. • Jasa pendidikan.
Kuadran III Sektor Potensial	Kuadran IV Sektor Tertinggal
• Transportasi dan pergudangan.	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan. • Pertambangan dan penggalan. • Industri pengolahan. • Jasa lainnya.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen dengan pendekatan PDRB di Kota Surakarta maka dapat dilihat bahwa beberapa klasifikasi sektor:

- a. Sektor Maju dan Tumbuh Pesat :
 - Pengadaan listrik dan gas.
 - Penyediaan akomodasi dan makan minum.
 - Informasi dan komunikasi.
 - Jasa keuangan dan asuransi.
 - Real estate.
 - Jasa perusahaan.
 - Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- b. Sektor Maju Tapi Tertekan :
 - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
 - Konstruksi.

- Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
 - Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
 - Jasa pendidikan.
- c. Sektor Potensial : • Transportasi dan pergudangan
- d. Sektor Tertinggal : • Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- Pertambangan dan penggalian.
 - Industri pengolahan.
 - Jasa lainnya.

BAB IV:

PELUANG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA

Peluang investasi di Kota Surakarta diuraikan berdasarkan potensi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta dan hasil identifikasi terhadap peluang investasi yang dapat dipromosikan lebih lanjut agar menjadi daya tarik bagi investor.

4.1. Pemanfaatan Peluang Investasi Berdasarkan Arah Pengembangan Wilayah Kota Surakarta

Mengacu pada rencana struktur dan pola ruang Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, terdapat beberapa potensi investasi yang dapat dijadikan peluang untuk dipromosikan kepada pihak investor. Peluang investasi berdasarkan rencana pengembangan wilayah Kota Surakarta antara lain berikut:

1. Kawasan Pengembangan Energi

Kawasan pengembangan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan seluas 3 ha dan Kecamatan Jebres seluas 8 ha. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo di Kecamatan Jebres.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di masing masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar

Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan, dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan. Untuk menunjang pariwisata, dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.

4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan

Ekonomi Kawasan ini meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; (iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.

5. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.

Kawasan ini antara lain, (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.

6. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pengembangan kawasan strategis ini yaitu kawasan Solo Techno Park (STP) dan sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan Solo Techno Park dan sekitarnya meliputi:

- a) kerjasama penataan kawasan Solo Techno Park
 - b) perpaduan penataan kawasan Solo Techno Park dengan kawasan di sekitarnya
 - c) mendorong kegiatan pameran teknologi.
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pengembangan kawasan strategis ini yaitu berupa Kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan tersebut meliputi:

- a) peningkatan fungsi kawasan sebagai RTH dan rekreasi
- b) pelestarian flora dan fauna
- c) pengembangan pameran dan atraksi budaya.

4.2. Promosi Investasi Unggulan Kota Surakarta

Proyek investasi yang berpeluang dipromosikan berdasarkan hasil rakor potensi dan peluang investasi Kota Surakarta tahun 2022 yang dituangkan ke dalam Dokumen Kajian Strategi Promosi Penanaman modal, terdapat 27 proyek investasi unggulan daerah Kota Surakarta yang menjadi target untuk dipromosikan. Di mana dari 27 proyek investasi unggulan tersebut sebanyak 14 proyek memiliki potensi untuk dilakukan kerjasama melalui model Kerjasama Antar Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sementara itu sisanya 13 proyek dapat dilakukan model non KPBU.

Dari ke 27 yang akan menjadi unggulan promosi investasi di Kota Surakarta tersebut saat ini ada yang sudah selesai pembangunan maupun revitalisasi, ada juga yang masih dalam proses, dan ada juga yang masih dalam proses perencanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peluang investasi yang ditawarkan terhadap proyek unggulan menjadi berbeda-beda.

Peluang penanam modal di Kota Surakarta yang ditawarkan kepada investor/badan usaha dapat dikategorikan menjadi beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Pembangunan : Proses mendirikan gedung dan bangunan di atas sebuah lahan kosong yang dilengkapi dengan interior dan mebel hingga siap digunakan untuk satu aktivitas tertentu.
2. Pengembangan : Proses restorasi, renovasi, atau revitalisasi sebuah bangunan dan gedung yang dilengkapi dengan interior dan mebel hingga siap digunakan untuk satu aktivitas tertentu.
3. Pengelolaan : Proses penyelenggaraan tata kelola atau manajemen sebuah bangunan dan gedung yang dilengkapi dengan interior dan meubel untuk satu aktivitas tertentu.

Peluang investasi di Kota Surakarta bisa terdiri dari satu, dua, atau tiga alternatif di atas. Karenanya investor dapat sekaligus mengambil kesempatan untuk membangun, mengembangkan, atau mengelola sebuah peluang investasi tertentu sesuai dengan kapabilitas, kompetensi, fokus bisnisnya. Adapun gambaran proyek investasi yang berpeluang dipromosikan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Proyek Investasi yang Berpeluang Dipromosikan

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
A	PARIWISATA							
1.	Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo	Masjid Raya Sheikh Zayed mulai dibangun pada 6 Maret 2021. Pembangunan masjid itu menelan biaya Rp 300 miliar. Peresmian Masjid Zayed dipimpin Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada 14 November 2022. Peresmian ditandai dengan kegiatan salat sunah dan penandatanganan prasasti. Bangunan utama Masjid Zayed memiliki luas 8.000 meter persegi. Masjid itu terdiri atas dua lantai. Luas lahan Masjid Zayed secara keseluruhan mencapai 3 hektare. Masjid ini mampu menampung 10 ribu jemaah. Masjid Zayed merupakan simbol persahabatan dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) MBZ untuk Presiden Joko Widodo. Pembangunan Masjid Zayed berstatus hibah.	Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari			V	• Pembangunan area parkir. • Pembangunan counter/kios makanan, minuman, dan cinderamata.	Parkir, counter/ kios makanan, minuman dan cinderamata
2.	Revitalisasi Kebun Binatang Jurug	Revitalisasi terhadap Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) telah dilaksanakan pada tahun 2022. TSTJ dikembangkan sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu kawasan resapan air, terdapat zonasi untuk kawasan sempadan	Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.	V	V	V	Pengembangan sarana dan pusat kesehatan hewan	

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		sungai dan ruang terbuka hijau (RTH). Di dalamnya difungsikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang meliputi taman wisata alam, taman rekreasi dan kebun binatang. Di dalamnya terdapat satwa-satwa yang dikondisikan seperti pada habitat aslinya. Bagi pengunjung yang datang, dapat berkeliling kebun binatang dengan berjalan kaki. Selain itu terdapat penambahan spot-spot wisata yang lebih menarik untuk dikunjungi.						
3.	Pembangunan Shelter Manahan	Penataan shelter PKL di Kawasan Stadion Manahan merupakan satu dari 10 prioritas proyek revitalisasi Kota Surakarta. Mulanya penataan shelter PKL ini dilakukan sebagai persiapan menjelang Piala Dunia U-20 pada 2023, dimana Stadion Manahan menjadi salah satu venue perhelatan akbar olahraga sepak bola dunia di bawah 20 tahun tersebut. Selain itu, alasan penataan ini dilakukan dengan tujuan menjadikan ruang publik yang lebih tertata dan modern, sehingga nyaman untuk aktivitas berolahraga. Walaupun perhelatan Piala Dunia U-20 pada 2023 gagal terlaksana, saat ini shelter PKL di Kawasan Stadion Manahan sudah siap digunakan bagi para PKL. Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan penataan ruang publik di kawasan Shelter Manahan, diharapkan keberadaan PKL	Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.			V	Pembangunan media pemasangan reklame.	Media pemasangan reklame

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba- ngunan	Pengem- -bangan	Penge- -lolaan		
		menjadi lebih rapi dan menjadi lebih indah. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk memberikan tempat yang lebih nyaman pada pengunjung yang ingin berolahraga atau sekadar jalan-jalan untuk menikmati suasana Kota Surakarta.						
4.	Revitalisasi Lokananta	Revitalisasi Lokananta, studio rekaman pertama di Indonesia yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah yang dimulai sejak 27 November 2022 sudah selesai dilaksanakan. Proyek revitalisasi lokananta berada di lahan seluas 2,1, di terdapat tujuh arena yang disediakan, yaitu Galeri Lokananta, Studio Rekaman Lokananta, Lokananta Live House, Taman Lingkar Lokananta, Panggung Amphitheater Lokananta, Area ritel F&B, dan Area ritel kreatif.	Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan.		V	V	• Tiket wisata cagar budaya musik Indonesia kedua • Event pertunjukan kesenian usaha • Sewa counter UKM.	Tiket wisata dan even, sewa tempat usaha
5.	Revitalisasi Taman Balekambang	Revitalisasi Kawasan Taman Balekambang merupakan upaya mengembalikan fungsi awal Taman Balekambang sebagai kebon rojo atau kebun raja untuk taman di tengah kota. Pekerjaan revitalisasi taman ini dalam pelaksanaan konstruksinya lebih mengedepankan keseimbangan dan keramahan lingkungan. Tujuannya agar taman ini lebih banyak ruang terbuka hijau tempat masyarakat bersosialisasi. Konsep botanical garden yang alami dengan tidak menebang pohon dan terlalu banyak menggunakan beton. Penggunaan pembatas	Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.		V	V	• Pembangunan media pemasangan reklame. • Pembangunan konter/kios makanan, minuman, dan cinderamata.	Reklame, sewa lahan dsb

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		tidak pakai beton tapi pakai batu alam. Selain itu, untuk menjaga kondisi alami taman, tetap mempertahankan satwa yang ada di Taman Balekambang. Selain rusa, terdapat kelinci yang bisa diberi makan oleh pengunjung. Danau yang ada dikembalikan ke kondisi semula. Sedimentasinya sudah puluhan tahun dilakukan pengerukan sehingga akan kembali seperti aslinya. Revitalisasi Taman Balekambang dilaksanakan sejak tahun 2022, dan ditargetkan selesai tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).						
6.	Pembangunan Sasana Langen Tawang (sepanjang jalan mulai pedaringan sampai dengan TSTJ)	Rencana pembangunan Sasana Langen Tawang (sepanjang jalan mulai pedaringan sampai dengan TSTJ) masih dalam proses perumusan.	Kelurahan Jebres Kecamatan Banjarsari Jebres.	V			Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui skema Unsolicited	Penerimaan pengelolaan gedung dan bangunan KPBU.
7.	Revitalisasi Technopark	Solo Technopark (STP) adalah kawasan terpadu di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta, yang merupakan kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang memadukan unsur pengembangan iptek, kebutuhan pasar industri dan bisnis serta penguatan daya saing daerah. Solo Technopark juga merupakan pusat vokasi dan inovasi teknologi, pusat riset	Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.	V		V	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui skema Unsolicited	Penerimaan pengelolaan gedung dan bangunan.

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		teknologi, pusat riset teknologi terapan di kota Surakarta, yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis, dan pemerintahan (The Triple Helix Model of Innovation) serta komunitas masyarakat. Mengacu pada rencana pengembangan yang tertuang dalam profil investasi Kota Surakarta, akan dibangun Tower 21 lantai + 1 basement seluas 28.360 m3 terdiri dari : • Convention Hall • Ballroom • Kantor Sewa (2 lantai) • Information Communication Technology (ICT) • Meeting Room • Hotel (13 lantai) • Sport Center • Swimming Pool • Menara Pandang • Shopping Arcade • Restoran • Publik Space						
							Pembangunan gedung dan bangunan MICE.	Sewa fasilitas MICE
8.	Revitalisasi Ngarsopuro dan	Konsep penataan kawasan Ngarsopuro adalah memperpanjang lokasi Night Market Ngarsopuro, dari Jalan Diponegoro ke	Kelurahan Keprabon		V		Pembangunan counter/kios makanan,	City walk (sewa lahan untuk perdagangan)

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
	Koridor Gatot Subroto	selatan hingga koridor Jalan Gatot Subroto sepanjang 390 meter menjadi pusat industri kreatif. Penataan kawasan Ngarsopuro di tahun 2022 ini memperpanjang lokasi Night Market Ngarsopuro, seperti kawasan yang ada di Jalan Malioboro Yogyakarta.	Kecamatan Banjarsari.				minuman, dan cinderamata.	
9.	Pemanfaatan BMD Berupa Sebagian Tanah HP 116 Kel.Jebres, Kec. Jebres Kota Surakarta (Untuk Taman Air)	Rencana Pemanfaatan BMD Berupa Sebagian Tanah HP 116 masih dalam proses perumusan.	Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.	V			Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui skema Unsolicited	Penerimaan pengelolaan gedung dan bangunan KPBU.
	PENDIDIKAN							
1.	Pembangunan Islamic Centre	Rencananya, Islamic Center akan dibangun tidak jauh dari Masjid Raya Sheikh Zayed yang terletak di Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Pembangunan Islamic Center di Kota Surakarta ini sebagai kelanjutan dari pembangunan masjid replika Sheikh Zayed Grand Mosque sebagai hadiah dari Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Rencana proyek pembangunan Islamic Center terbesar di wilayah Solo ini dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan. Dalam pembangunan Islamic Center ini nantinya akan ada dua bangunan penting yang saling	Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari	V			Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui skema Unsolicited	Penerimaan pengelolaan gedung dan bangunan KPBU.

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		terhubung melalui terowongan di bawah jalur rel kereta api yang menghubungkan masjid dan Islamic Center.						
2	Museum Budaya Sains dan Teknologi	Museum Sains dan Teknologi Solo segera dibangun di kawasan Pedaringan, Jebres, Kota Surakarta. Pembangunan museum tersebut sebagai salah satu pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum Budaya Sains dan Teknologi Bengawan Solo dibangun di lahan Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan milik pemkot, seluas 55 hektare. Rencananya Museum tersebut diangun sebagai museum terbesar di Jawa Tengah, dengan kompleks museum terdiri Museum Budaya, Museum Ilmu Pengetahuan Alam, Museum Ilmu Pengetahuan Dasar, serta Museum Astronomi dan Antariksa. Museum juga dilengkapi dengan pusat riset, perkuliahan, dan diskusi ilmiah untuk publik.	Kawasan Pedaringan, Kecamatan Jebres	V		V	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui skema Unsolicited	Penerimaan pengelolaan gedung dan bangunan KPBU.
	KESEHATAN							
1.	Pembangunan LABKESDA (BLUD)	Rencana pembangunan Labkesda di Kota Surakarta sebagai wujud dalam mendukung penyediaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan	Kota Surakarta.	V			Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	Manfaat hanya didapatkan dari retribusi yang itu ditarik oleh pemerintah, perlu dilihat regulasi lainnya

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.						jika untuk pengembangan
2.	Pembangunan gedung pengolahan limbah medis	Pemerintah Kota Surakarta menawarkan kesempatan untuk mengembangkan Pengelolaan Limbah Medis di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Akibat dari pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan, Kota Surakarta menghasilkan lebih dari 7 ton limbah medis setiap harinya. Namun, jumlah limbah medis yang sangat besar tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan perusahaan yang dapat mengolah limbah medis tersebut. Pengelola limbah medis yang ada saat ini kewalahan dalam menangani limbah medis yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan dibangunnya pengolahan limbah medis di Putri Cempo Kota Surakarta akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi harga pengangkutan, sehingga dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak penghasil atau fasilitas kesehatan.	Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres.	V		V	● Pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPL) medis.	Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah
3.	Pembangunan gedung pengolahan limbah non medis	Rencana pembangunan gedung pengolahan limbah non medis di Kota Surakarta dalam rangka menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah non medis melibatkan berbagai jenis seperti limbah rumah tangga, industri, atau komersial.	Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres.	V		V	● Pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPL) non medis.	Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah non medis

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		Beberapa langkah yang umumnya diambil dalam pengelolaan limbah non medis melibatkan. Gedung pengolahan limbah non medis tersebut nantinya akan menjadi pusat pengurangan limbah melalui kegiatan daur ulang, pemilahan limbah, pengolahan limbah dan pembuangan limbah akhir yang tidak memungkinkan untuk mendaur ulang atau diolah lebih lanjut, limbah dapat dibuang dengan aman di tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan standar lingkungan.						
4.	Pengembangan Puskesmas Sangkrah (RS Tipe D)	-	Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon.			V	-	Penerimaan dari pasien umum
5.	Pengembangan Puskesmas Banyuanyar	-	Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari.			V	-	Penerimaan dari pasien umum
6.	Pengembangan Puskesmas Sibela	-	Kelurahan Setabelan			V	-	Penerimaan dari pasien umum
7.	Pembangunan RS Diabetes Surakarta	-	Dinkes Kecamatan Banjarsari.			V	-	Penerimaan dari pasien umum
8.	Pembangunan Rumah Sakit Hewan	Pembangunan Rumah Sakit Hewan rencananya akan dibangun di kawasan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Untuk penempatan lokasi, rumah sakit hewan dan	Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres	V		V	• Pembangunan RS hewan. • Pembangunan restoran/coun	• Penerimaan dari pasien (hewan).

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba- ngunan	Pengem- -bangan	Penge- lolaan		
		sarana edukasi serta laboratorium akan ditempatkan di bagian belakang TSTJ.					ter/kios makanan, minuman, dan cinderamata.	Sewa restoran/counter/kios makanan, minuman, dan cinderamata.
	EKONOMI KREATIF							
1.	Revitalisasi Sentra IKM Meubel Gilingan	Revitalisasi Sentra IKM Mebel Gilingan dilaksanakan tahun 2023. Untuk diketahui, sentra IKM Gilingan ini menempati lahan sekitar 5.000 meter persegi, namun tidak semua digunakan untuk bangunan fisik. Sentra IKM Gilingan diarahkan sebagai fasilitas penting untuk mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel. Maka peruntukan gedungnya pun mengikuti dengan gagasan tersebut, yaitu sebagai ruang produksi, ruang promosi, ruang pengelola, joglo dan ruang terbuka. Proses pembangunan yang sudah diawali dengan groundbreaking pada 19 Juli 2022 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta itu, kini terus dilakukan guna mempercepat realisasi keberadaan Sentra IKM Gilingan. Setidaknya nanti ada beberapa bangunan yang bakal digarap. Bangunan bagian depan, difungsikan sebagai ruang pameran atau ruang promosi, produksi dan kantor Sentra IKM Gilingan. Di bagian belakang sebagian besar sebagai ruang produksi, plitur dan	Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari.	V			• Pembangunan dan penataan kios PKL mebel. • Pembangunan media pemasangan reklame.	Sewa kios meubel.

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		pengeringan mebel atau proses mengurangi kadar air dalam kayu.						
2.	Pembangunan Solo Investment Corner Kota Surakarta	• Solo Investment Promotion Center (SIPC) merupakan tempat yang nyaman untuk mempromosikan investasi Solo ke calon investor • Perlu Kajian Infrastruktur/Gedung dan Sarpras yang Full Digital/Elektronik/Robotik • Belum ada FS dan DED.	Kota Surakarta.	V		V	• Penataan space untuk makanan, minuman, dan cinderamata. • Pembangunan counter/kios makanan, minuman, dan cinderamata.	Penyewaan space atau ruangan
3.	Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) eksklusif	Tempat Pemakaman Umum (TPU) eksklusif merujuk pada area pemakaman yang memiliki fasilitas dan layanan khusus, mungkin dengan beberapa keistimewaan atau fitur tambahan dibandingkan dengan TPU biasa. Ini bisa mencakup pemakaman di kawasan tertentu, desain makam yang lebih mewah, atau pelayanan tambahan seperti perawatan makam yang lebih intensif. TPU eksklusif sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memberikan penghormatan khusus atau menciptakan lingkungan yang lebih istimewa untuk orang yang telah meninggal.	Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres.	V		V	• Pembangunan kawasan pemakaman eksklusif. • Pembangunan restoran/ konter/ kios makanan, minuman, dan cinderamata.	• Penjualan kavling makam. • Penyewaan restoran/ konter/ kios makanan, minuman, dan cinderamata.
	PENDUKUNG							
1.	Pembangunan Elevated Rail	Pembangunan Elevated Rail Simpang Tujuh Joglo merupakan salah satu proyek dalam rangka mengatasi kemacetan yang kerap	• Kelurahan Joglo			V	Pembangunan media	Media pemasangan reklame

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
	Simpang Tujuh Joglo	terjadi di simpang tujuh Joglo. Pemerintah Kota Surakarta membangun rel ganda yang akan dibangun secara layang. Sehingga rel kereta api tidak sebidang dengan jalan raya, namun akan dibuatkan rel layang. pembangunan rel layang yang dibangun di Simpang Tujuh Joglo, Solo, merupakan rel layang terpanjang di Indonesia, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo, Solo. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Solo Balapan – Kalioso dan Rekayasa Lalu Lintas di Simpang Joglo Kota Surakarta hasil kerja sama Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta yang bersinergi melakukan penataan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo, Solo, Jawa Tengah. Ada beberapa tahap penataan dalam proyek tersebut. Dijelaskan dalam website Dephub, penataan yang dilakukan yaitu: Pertama, pembangunan rel ganda kereta api elevated (layang) sepanjang 1,8 KM yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Desain konstruksi jembatan rel layang mengadopsi kearifan lokal yang ada kota Solo yaitu Batik Sidomukti, Pasar Klewer dan Keraton. Proyek rel ganda KA Solo Balapan – Kalioso sepanjang 10 Km'sp,	Kecamatan Banjarsari. ● Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari. ● Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari. ● Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari.				pemasangan reklame.	

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir tahun 2023.						
2.	Pembangunan jalan tol lingkaran timur selatan	Pembangunan jalan tol lingkaran timur selatan pada tahun 2022 dalam proses pembebasan lahan sekitar 625 m ² . Keberadaan jalan itu dibutuhkan karena adanya ancaman kemacetan lalu lintas total di Kota Surakarta beberapa tahun mendatang. Penambahan infrastruktur berupa jalan lingkaran merupakan solusi yang bisa ditempuh.	Lintas daerah meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten	V			- Pembangunan jalan tol. - Pembangunan media pemasangan reklame.	- Media pemasangan reklame. - Penerimaan tarif tol.
3.	Pembangunan Pasar Jongke	Pasar Jongke merupakan pasar tradisional yang terletak di wilayah barat Kota Surakarta merupakan pasar dengan kategori 1B. Pasar Jongke terbagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat merupakan perkiosan dan pasar tradisional yang didalamnya sebagai pusat kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari seperti: sembako, daging, pakaian dan jajanan. Sedangkan bagian timur menjadi pusat jual beli sepeda bekas, sepeda - sepeda tersebut bermerek dan banyak diburu kolektor sepeda kuno. Rencananya revitalisasi Pasar Jongke ini untuk 2 lantai dengan bentuk Investasi yang ditawarkan	Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan.	V		V	Pembangunan pasar Jongke.	- Sewa ruangan dan space terbuka. - Sewa media pemasangan reklame. - Parkir

No	Investasi Unggulan	Deskripsi Proyek Investasi	Lokasi	Skema Kerjasama			Investasi	Potensi Penerimaan
				Pemba-ngunan	Pengem-bangan	Penge-lolaan		
		yaitu Kerjasama Build, Operate, dan Transfer (BOT) selama 25 Tahun.						
4.	Pengadaan Videotron sarana informasi dan promosi dan pasar tradisional	Penyediaan videotron pada lokasi-lokasi vital Kota Surakarta yang sudah ditetapkan berdasarkan tata ruang Kota.	Kota Surakarta.	V		V	Penyediaan videotron.	Sewa dari media reklame.

Sumber: Data kajian promosi Kota Surakarta diolah, 2023.

BAB V:

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi

Dalam masterplan investasi ini, ditetapkan Visi jangka panjang investasi Kota Surakarta sebagai berikut:

**“Kota Berbudaya, Ramah Investasi dan Berkelanjutan menuju
Pertumbuhan Ekonomi dan terwujudnya masyarakat Sejahtera”**

Visi di atas memberikan gambaran bahwa investasi di Kota Surakarta dilandaskan pada 3 aspek, yaitu budaya, ramah dan berkelanjutan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi dan perwujudan masyarakat sejahtera.

1. Kota Berbudaya

Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Nilai religius ini dalam konteks tata kelola pemerintahan dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan.

b. Nilai seni atau estetika yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya karya industri kreatif.

c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat.

Nilai gotong royong dekat dengan konsep srawung yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”

d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama.

Istilah “nguwongke uwong” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola pemerintahan saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

2. Ramah Investasi

Ramah memiliki arti dasar nyaman, dalam hal ini Kota Surakarta memberikan rasa nyaman kepada investor dalam melakukan kegiatan usaha di Kota Surakarta. Ramah kaitannya dengan investasi diwujudkan dalam bentuk berbagai kemudahan dalam hal membenahi regulasi, birokrasi, sarana dan prasarana infrastruktur, dan kesiapan SDM melayani. Perwujudan ramah selain nyaman juga rasa aman. Kota Surakarta yang didukung dengan ruang publik yang memadai, ruang kreatif yang berkembang serta interaksi sosial masyarakat yang menjunjung nilai-nilai budaya akan memberikan rasa aman

bagi siapa saja yang tinggal dan menetap di Kota Surakarta. Dari sisi keamanan, Kota Surakarta merupakan kota dengan tingkat keamanan yang baik, yang terwujud dari rendahnya tingkat kriminalitas, dan rendahnya gangguan ketertiban umum.

3. Berkelanjutan

Investasi yang aman dan nyaman diharapkan memberikan dampak keberlanjutan. Dalam hal ini, aktivitas usaha di Kota Surakarta diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat, seraya memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepedulian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Disatu sisi semakin besar investasi suatu daerah, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

5. Masyarakat Sejahtera

Investasi menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan di Kota Surakarta. Tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta, sehingga akan berdampak pada kondisi kemakmuran masyarakat baik dari pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakatnya, dapat hidup layak dan mampu berkembang.

Adapun misi yang ditetapkan sebagai penterjemahan atas visi investasi di atas adalah:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aman.
2. Mewujudkan infrastruktur investasi yang memadai
3. Menjamin adanya kepastian hukum
4. Mewujudkan investasi yang ramah lingkungan,

5. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan berkembangnya ekonomi kreatif
6. Mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkeadilan.

5.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam menjabarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban wilayah
2. Membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan investasi
3. Mewujudkan harmonisasi kebijakan pengaturan investasi dan usaha sesuai kewenangan daerah
4. Pengaturan penempatan investasi sesuai kebijakan penataan ruang dan pencegahan/pengendalian dampak lingkungan,
5. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan menumbuhkembangkan inovasi dan ekonomi kreatif
6. Mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkeadilan

5.3. Sasaran

Sasaran jangka panjang dari penetapan tujuan pencapaian masterplan investasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kasus gangguan keamanan wilayah
2. Menurunnya kasus gangguan ketertiban umum
3. Menurunnya konflik hubungan industrial
4. Terbangungnya infrastruktur baru untuk mendukung tumbuhnya investasi
5. Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada sehingga berfungsi baik untuk mendukung iklim kondusif investasi
6. Meningkatnya pertumbuhan inovasi dan berkembangnya 17 sub sektor ekonomi kreatif
7. Terwujudnya kebijakan investasi yang konsisten dalam rangka mendukung tumbuhnya investasi

8. Terbitnya peraturan perundangan daerah yang sinkron dan konsisten mendorong perwujudan iklim kondusif investasi.
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang melayani.

Gambaran keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran investasi di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1. : Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Investasi di Kota Surakarta

VISI: “Kota Berbudaya, Ramah Investasi dan Berkelanjutan menuju Pertumbuhan Ekonomi dan terwujudnya masyarakat Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aman.	Meminimalkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban wilayah	● Menurunnya kasus gangguan keamanan wilayah ● Menurunnya kasus gangguan ketertiban umum ● Menurunnya konflik hubungan industrial
Mewujudkan infrastruktur investasi yang memadai	Membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan investasi	● Terbangungnya infrastruktur baru untuk mendukung tumbuhnya investasi ● Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada sehingga berfungsi baik untuk mendukung iklim kondusif investasi
Menjamin adanya kepastian hukum	Mewujudkan harmonisasi kebijakan pengaturan investasi dan usaha sesuai kewenangan daerah	Terbitnya peraturan perundangan daerah yang sinkron dan konsisten mendorong perwujudan iklim kondusif investasi
Mewujudkan investasi yang ramah lingkungan,	Pengaturan penempatan investasi sesuai kebijakan penataan ruang dan	Terwujudnya kebijakan investasi yang konsisten dalam rangka

VISI: “Kota Berbudaya, Ramah Investasi dan Berkelanjutan menuju Pertumbuhan Ekonomi dan terwujudnya masyarakat Sejahtera”		
Misi	Tujuan	Sasaran
	pencegahan/pengendalian dampak lingkungan,	mendukung tumbuhnya investasi
Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan berkembangnya ekonomi kreatif	Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan menumbuhkembangkan inovasi dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan inovasi dan berkembangnya 17 sub sektor ekonomi kreatif
Mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkeadilan	Mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur yang melayani.

BAB VI: ROADMAP INVESTASI

6.1. Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor ekonomi unggulan dalam kajian ini akan ditetapkan berdasarkan hasil analisis LQ, analisis *shift share*, dan analisis tipologi klassen yang telah dilakukan di bagian sebelumnya. Analisis LQ pada dasarnya dilakukan untuk menentukan sektor basis (*leading sector*) dan sektor non basis. Dimana sektor basis merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan sektor non basis merupakan sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh tersebut.

Analisis *shift share* merupakan metode analisis untuk mengetahui struktur perekonomian pada suatu wilayah, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas, misalnya Kabupaten/Kota terhadap Provinsi. Sementara analisis tipologi klassen merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan struktur ekonomi daerah.

Metode LQ, metode *shift share*, dan metode tipologi klassen menggunakan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) sebagai basis analisisnya. Dimana data PDRB yang dipakai dalam kajian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha. Sementara, sebagai pembanding, kajian ini akan menggunakan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis ketiga metode tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1: Klasifikasi Sektor Ekonomi Kota Surakarta

No	Metode Analisis	Klasifikasi			
1.	Analisis LQ	Sektor Basis		Sektor Non Basis	
		● Pengadaan listrik dan gas. ● Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. ● Konstruksi. ● Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil. ● Penyediaan akomodasi dan makan minum. ● Informasi dan komunikasi. ● Jasa keuangan dan asuransi. ● Real estate. ● Jasa perusahaan. ● Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial. ● Jasa pendidikan. ● Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.		● Pertanian, kehutanan, dan perikanan. ● Pertambangan dan penggalian. ● Industri pengolahan. ● Transportasi dan pergudangan. ● Jasa lainnya.	
2.	Analisis Shift Share	Pertumbuhan		Daya Saing	
		Cepat	Lambat	Tinggi	Rendah
		● Pengadaan listrik dan gas. ● Konstruksi. ● Transportasi dan pergudangan. ● Penyediaan akomodasi dan makan minum. ● Informasi dan komunikasi. ● Real estate. ● Jasa perusahaan. ● Jasa pendidikan. ● Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. ● Jasa lainnya	● Pertanian, kehutanan, dan perikanan. ● Pertambangan dan penggalian. ● Industri pengolahan. ● Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. ● Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil. ● Jasa keuangan dan asuransi. ● Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial.	● Pertanian, kehutanan, dan perikanan. ● Industri pengolahan. ● Pengadaan listrik dan gas. ● Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil. ● Penyediaan akomodasi dan makan minum. ● Jasa keuangan dan asuransi ● Administrasi pemerintahan,	● Pertambangan dan penggalian. ● Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. ● Konstruksi. ● Transportasi dan pergudangan. ● Informasi dan komunikasi. ● Real estate. ● Jasa perusahaan. ● Jasa pendidikan. ● Jasa lainnya.

No	Metode Analisis	Klasifikasi			
				pertanahan, dan jaminan sosial. ● Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	
3.	Analisis Tipologi Klasen	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial	Sektor Tertinggal
		● Pengadaan listrik dan gas. ● Penyediaan akomodasi dan makan minum. ● Informasi dan komunikasi. ● Jasa keuangan dan asuransi. ● Real estate. ● Jasa perusahaan. ● Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	● Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. ● Konstruksi. ● Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. ● Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. ● Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. ● Jasa pendidikan.	● Transportasi dan pergudangan	● Pertanian, kehutanan, dan perikanan. ● Pertambangan dan penggalan. ● Industri pengolahan. ● Jasa lainnya.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan hasil analisis LQ, analisis *shift share*, dan analisis tipologi klassen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sektor ekonomi di Kota Surakarta dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sementara dengan analisis *shift share*, sektor ekonomi di Kota Surakarta dapat dikelompokkan menjadi sektor yang mempunyai pertumbuhan cepat dan lambat serta sektor yang mempunyai daya saing tinggi dan rendah. Analisis tipologi klassen mengklasifikasikan sektor ekonomi Kota Surakarta menjadi empat, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, dan sektor tertinggal.

Selanjutnya, dengan menggunakan hasil analisis analisis LQ, analisis *shift share*, dan analisis tipologi klassen tersebut akan dilakukan penilaian terhadap setiap sektor ekonomi di Kota Surakarta. Hasil penilaian akan menunjukkan posisi dan kondisi setiap sektor ekonominya, khususnya perannya sebagai sektor basis/non basis, tingkat pertumbuhan, daya saing, serta capaian selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 6.2: Potensi Sektor Ekonomi Kota Surakarta

No	Sektor Ekonomi	Klasifikasi
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	• Sektor non basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing tinggi. • Sektor tertinggal.
2.	Pertambangan dan Penggalian	• Sektor non basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing rendah. • Sektor tertinggal.
3.	Industri Pengolahan	• Sektor non basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing tinggi. • Sektor tertinggal.
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing tinggi. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	• Sektor basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing rendah. • Sektor maju, tapi tertekan.
6.	Konstruksi	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah.

No	Sektor Ekonomi	Klasifikasi
		• Sektor maju, tapi tertekan.
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	• Sektor basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing tinggi. • Sektor maju, tapi tertekan.
8.	Transportasi dan Pergudangan	• Sektor non basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor potensial.
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing tinggi. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
10.	Informasi dan Komunikasi	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	• Sektor basis • Pertumbuhan lambat, daya saing tinggi. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
12.	Real Estate	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
13.	Jasa Perusahaan	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	• Sektor basis. • Pertumbuhan lambat, daya saing tinggi. • Sektor maju, tapi tertekan.
15.	Jasa Pendidikan	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor maju, tapi tertekan.
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	• Sektor basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing tinggi. • Sektor maju dan tumbuh pesat.
17.	Jasa Lainnya	• Sektor non basis. • Pertumbuhan cepat, daya saing rendah. • Sektor tertinggal.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Dari tabel di atas, jika menggunakan klasifikasi sebagai sektor ekonomi basis, yang mempunyai pertumbuhan cepat, daya saing tinggi, serta sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, maka sektor yang dapat diklasifikasikan sebagai sektor unggulan adalah:

- Pengadaan listrik dan gas.
- Penyediaan akomodasi dan makan minum.

- Real estate.
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor ekonomi di atas merupakan sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta berdasarkan perannya sebagai sektor basis, tingkat pertumbuhan, daya saing, serta capaian selama beberapa tahun terakhir. Sektor ekonomi yang dikategorikan sebagai sektor basis merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah.

Sementara sektor ekonomi yang dikategorikan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cepat merupakan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan jauh lebih progresif dibandingkan sektor yang lain. Sektor ekonomi yang dikategorikan mempunyai daya saing tinggi merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan sektor yang lain. Sedangkan sektor ekonomi yang dikategorikan maju dan tumbuh pesat merupakan sektor memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

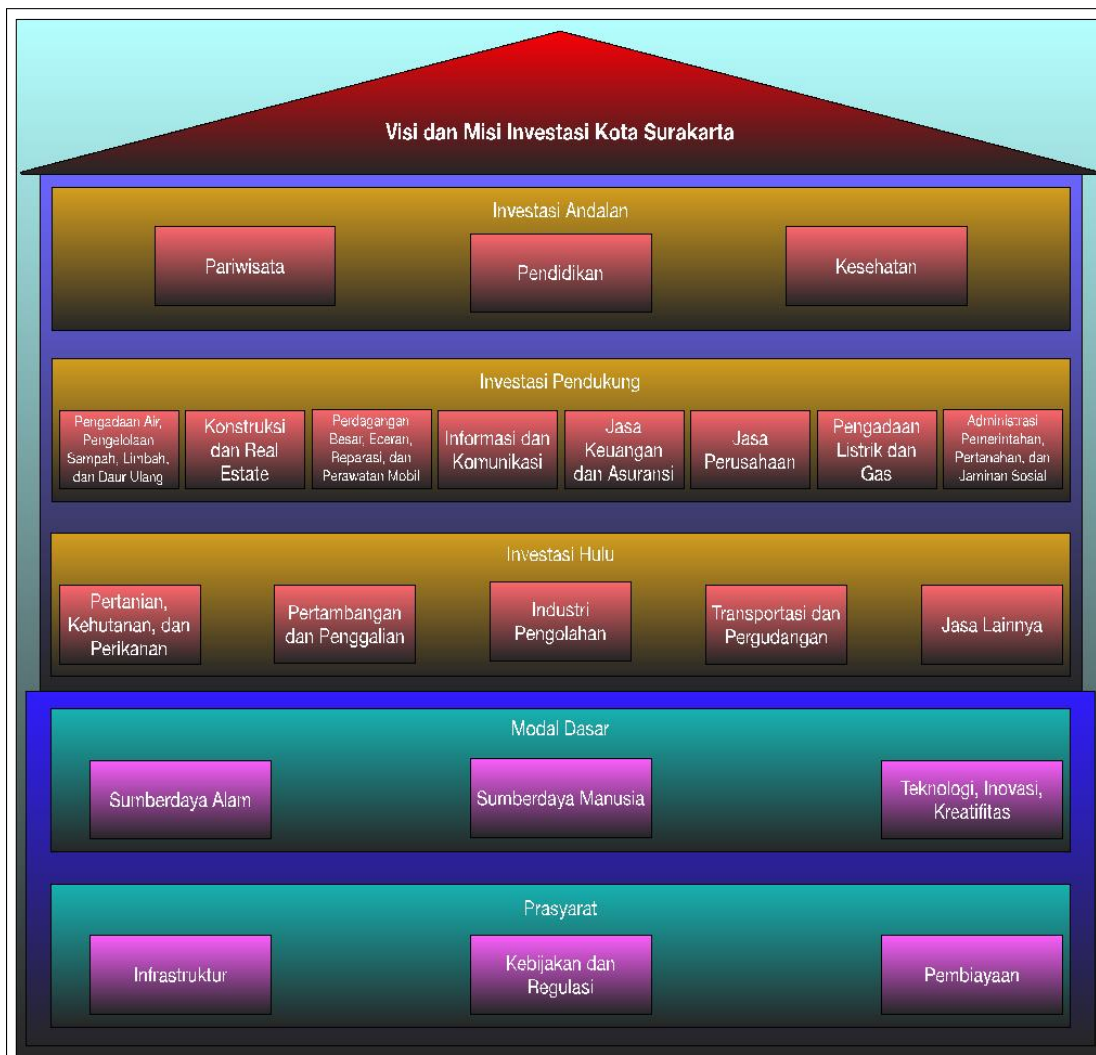
Diluar sektor unggulan tersebut, Kota Surakarta juga mempunyai beberapa sektor ekonomi lainnya namun berdasarkan analisis LQ, analisis *shift share*, dan analisis tipologi klassen tidak bisa diklasifikasikan sebagai sektor unggulan karena tidak memenuhi kriteria sebagai sektor basis, tingkat pertumbuhan, daya saing, serta maju dan tumbuh pesat. Berbagai sektor non unggulan ini pada dasarnya dapat ditingkatkan menjadi sektor unggulan, yaitu dengan memperbaiki dan menaikkan kinerja capaian PDRB-nya.

Alasan itulah mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta adalah memperbaiki dan menaikkan kinerja capaian PDRB, khususnya untuk sektor ekonomi non unggulan. Dimana upaya yang harus dilakukan Pemerintah adalah dengan meningkat status sektor ekonomi tersebut

menjadi sektor basis, mendorong tingkat pertumbuhannya, memperbaiki daya saingnya, serta mengembangkannya menjadi lebih maju dan bisa tumbuh lebih pesat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis di atas, akan disusun rumah investasi Kota Surakarta (*house of investment*). Dimana sektor ekonomi unggulan/andalan akan menjadi bagian utama dalam rumah investasi Kota Surakarta. Sementara sektor ekonomi basis namun mempunyai pertumbuhan lambat, daya saing rendah, bukan sektor yang maju, dan tertekan dikategorikan sebagai bagian pendukung dalam bangun rumah investasi Kota Surakarta. Sedangkan sektor ekonomi non basis dikategorikan sebagai bagian hulu dalam bangun utama investasi Kota Surakarta.

Diluar bangun utama tersebut, rumah investasi Kota Surakarta dilengkapi dengan pondasi yang terdiri dari modal dasar dan prasyarat pengembangan investasi daerah. Modal dasar pengembangan investasi daerah terdiri dari sumberdaya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta teknologi, inovasi, dan kreatifitas. Sementara prasyarat pengembangan investasi daerah terdiri dari infrastruktur, kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan.



Gambar 6.1: The House of Investment Kota Surakarta

6.2. Variabel Kunci Investasi

Variabel kesuksesan kunci (*key success variable*) atau variabel kunci merupakan faktor penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal sebuah entitas tertentu. Pada dasarnya setiap entitas mempunyai variabel kunci yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut tidak bisa dilakukan

hanya melihat entitas lain. Selain itu tidak semua faktor yang berhasil diidentifikasi menjadi variabel kunci bagi sebuah entitas.

Identifikasi terhadap variabel kesuksesan kunci (*key success variable*) strategi pengembangan investasi Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis TOWS. Analisis SWOT pada dasarnya dilakukan dengan mendata dan mencermati kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan atau ancaman (*threats*) menyusun strategi pengembangan investasi Kota Surakarta.

Selanjutnya, hasil analisis SWOT, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan empat strategi utama strategi pengembangan investasi Kota Surakarta, yaitu (1) **strategi S-O**, yakni strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang, (2) **strategi W-O**, yakni strategi untuk menekan kelemahan untuk meraih peluang, (3) **strategi S-T**, yakni strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan (4) **strategi W-T**, yakni strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman. Dimana langkah berikutnya yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah menentukan variabel kesuksesan kunci strategi pengembangan investasi Kota Surakarta.

Tabel 6.3: Analisis TOWS Investasi Kota Surakarta

	Peluang	Tantangan
	• Kota Surakarta dilewati jalan tol Trans Jawa dengan beberapa gerbang akses keluar/masuk Kota Surakarta, baik yang langsung berada di Kota Surakarta maupun di sekitar wilayah Kota Surakarta yang membuat orang menjadi mudah untuk menuju dan keluar dari Kota Surakarta. • Kota Surakarta mempunyai sarana dan prasarana pendukung investasi yang cukup komprehensif, mulai dari hotel, restoran, perbankan, kawasan perdagangan modern dan tradisional, air minum perpipaan, tempat pengolahan sampah (TPA Putri Cempo), sampai dengan rumah sakit. • Kota Surakarta merupakan kota metropolitan bagi kawasan Aglomerasi Soloraya sehingga menjadi tujuan bagi warga dari daerah sekitarnya untuk jalan-jalan, mencari hiburan, berbelanja, maupun tempat pertemuan dengan kolega/keluarga. • Kota Surakarta merupakan salah satu simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan kawasan bagian barat, timur, utara, dan selatan Pulau Jawa, sehingga	• Kota Surakarta dikelilingi oleh daerah yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan lahan yang relatif cukup luas untuk memenuhi kebutuhan investasi, bahkan industri manufaktur, yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. • Kota Surakarta menghadapi keterbatasan pasokan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun kuantitatif, padahal ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan investasi, khususnya untuk industri jasa yang bersifat padat karya (<i>labor-intensive industry</i>). • Kota Surakarta mempunyai Upah Minimal Kota (UMK) yang relatif tidak jauh berbeda dengan UMK wilayah Aglomerasi Soloraya lainnya, baik Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Wonogiri, Klaten dan Sragen.

	selalu dilewati dan menjadi pilihan tempat transit bagi masyarakat yang bepergian. • Kota Surakarta mempunyai kesempatan untuk mengatur penanaman modal daerah sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. • Kota Surakarta terdapat Bank Indonesia, bank nasional, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bisa menjamin ketersediaan sumber pembiayaan penanaman modal yang dibutuhkan oleh investor yang masuk di Kota Surakarta, baik PMDN maupun PMA. • Kota Surakarta mempunyai tingkat pertumbuhan Usaha/Industri Mikro Kecil Menengah yang relatif cukup besar selama beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan usaha/industri besar.	
Kekuatan	Strategi S-O	Strategi S-T
• Kota Surakarta sudah memiliki instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dibidang perizinan dan penanaman modal, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta.	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi untuk mendorong para investor, baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat kebijakan untuk memberi fasilitas tertentu kepada tenaga kerja yang tercatat sebagai karyawan perusahaan yang berlokasi dan beroperasi di Kota Surakarta, misalnya hak untuk menggunakan Rusunawa.

• Kota Surakarta sudah memiliki payung hukum dibidang pembangunan, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. • Kota Surakarta sudah memiliki payung hukum dibidang penanaman modal, yaitu Perwali Surakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang RUPM Kota Surakarta. • Kota Surakarta mempunyai Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” yang salah satu unit usahanya adalah menyediakan lahan parkir untuk kendaraan angkutan besar dan pergudangan.	berkualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi yang mendorong para investor baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang mempunyai daya saing internasional. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi yang mendorong para investor baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang berkualitas dan berorientasi ekspor. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian insentif bagi investor, baik PMDN maupun PMA, yang mampu mengembangkan usaha/industri dengan keterkaitan antara usaha/industri penghasil bahan baku dengan usaha/industri pengolah bahan baku (<i>backward linkage</i>). • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian insentif bagi investor, baik PMDN maupun PMA, yang mampu mengembangkan	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan investasi bukan pada sektor usaha/industri yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak mengingat keterbatasan pasokan tenaga kerja, yaitu UMKM.
--	---	---

	usaha/industri dengan keterkaitan antara usaha/industri yang menghasilkan sebuah produk tertentu dengan usaha/industri pengguna produk tersebut (<i>forward linkage</i>).	
Kelemahan	Strategi W-O	Strategi W-T
• Kota Surakarta merupakan daerah yang luas lahannya relatif sangat terbatas sebagaimana kawasan perkotaan pada umumnya, yaitu 4.672 Ha, dimana sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai kawasan permukiman/perumahan (65,51%). • Kota Surakarta tidak memiliki lahan yang secara khusus dialokasikan dan difungsikan sebagai kawasan industri, termasuk kawasan yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah (IKM). • Kota Surakarta belum memiliki regulasi yang mengatur kemudahan penanaman modal sebagai payung hukum untuk menyediakan dan memberikan insentif bagi para investor, baik PMDN maupun PMA, khususnya yang bergerak dibidang jasa. • Kota Surakarta merupakan daerah yang infrastruktur transportasinya, khususnya jalan dalam kota antar kawasan, relatif sulit untuk dikembangkan, baik dari aspek	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan sektor investasi pada bidang jasa yang relatif lebih sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan yang luas lahannya terbatas. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang bisa menekan <i>high cost economy</i> dan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan di Kota Surakarta, misalnya perijinan yang semakin mudah dan murah, menekan praktek premanisme, dan sebagainya. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat kebijakan pemberian insentif kepada perusahaan yang berlokasi di wilayah Aglomerasi Soloraya untuk membuka <i>head office</i> di Kota Surakarta.	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pada pengembangan usaha/industri yang berbasis pada ekonomi kreatif yang mengedepankan produk yang unik, pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (<i>information and communication technology</i>), perlindungan terhadap hak cipta (<i>copyright</i>).

kelebaran maupun panjangnya, padahal jumlah kendaraan terus bertambah. • Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang tidak mempunyai kawasan pertambangan yang menghasilkan mineral, bahan galian, maupun material sejenis lainnya. • Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang tidak mempunyai kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang mampu menghasilkan komoditas untuk memasok industri pengolahan skala menengah dan besar.		
--	--	--

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas merupakan hasil penyusunan strategi pengembangan investasi Kota Surakarta yang dilakukan dengan analisis TOWS, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Selain TOWS juga dilakukan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan.

Strategi TOWS selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi **variabel keberhasilan kunci (*key success variable*)**, yaitu faktor-faktor yang penting bagi sebuah entitas untuk menunjang keberhasilan tujuan utama yang telah ditetapkan yang berasal dari lingkungan entitas itu sendiri. Demikian juga dengan variabel keberhasilan kunci pengembangan investasi Kota Surakarta yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisis TOWS. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis TOWS, akan dilakukan identifikasi terhadap variabel keberhasilan kunci pengembangan investasi Kota Surakarta.

1. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi untuk mendorong para investor, baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang berkualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini mengingat bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keberadaan label SNI pada sebuah produk sebagai jaminan barang tersebut aman dan layak untuk digunakan dan dikonsumsi. Karenanya itulah masyarakat mulai cenderung untuk memilih dan membeli barang berlabel SNI ketika berbelanja satu produk tertentu.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberi fasilitasi untuk mendorong investor atau pengusaha agar mampu menghasilkan produk, khususnya yang berupa barang, memenuhi kualifikasi. Harapannya, agar produk Kota Surakarta

mampu bersaing dengan barang sejenis dari berbagai daerah lain di Indonesia.

2. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi yang mendorong para investor baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang mempunyai daya saing internasional.

Hal ini mengingat bahwa pasar saat ini tidak lagi hanya berskala lokal maupun nasional, namun telah berkembang berskala regional bahkan global. Dimana transaksi tidak lagi mengenal tempat, lokasi, jarak, dan waktu. Karena itulah setiap orang bisa melakukan transaksi untuk membeli dan memperoleh berbagai barang yang dihasilkan di negara lain dengan mudah dan murah. Demikian juga dengan jasa, misalnya pariwisata, yang bisa dinikmati oleh siapapun dari seluruh penjuru dunia.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberi fasilitasi untuk mendorong investor atau pengusaha agar mampu menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, mempunyai daya saing internasional. Harapannya, agar produk Kota Surakarta mampu bersaing dengan barang dan jasa sejenis dari negara lain.

3. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan fasilitasi yang mendorong para investor baik PMDN maupun PMA, agar mengembangkan dan menghasilkan berbagai produk yang berkualitas dan berorientasi ekspor.

Hal ini mengingat bahwa sebuah produk dapat dikategorikan berkualitas dan berorientasi ekspor harus memenuhi standar tertentu, terutama dari aspek kualitas, harga, kontinuitas produksi, kemasan, dan sebagainya. Upaya ini sebenarnya dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mendorong pengusaha di Kota Surakarta untuk menghasilkan

produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberi fasilitasi untuk mendorong investor atau pengusaha agar menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, memenuhi standar ekspor. Harapannya, agar berbagai produk yang dihasilkan di Kota Surakarta mampu bersaing dengan barang dan jasa sejenis dari negara lain.

4. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan sektor investasi pada bidang jasa yang relatif lebih sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan yang luas lahannya terbatas.

Hal ini mengingat bahwa industri manufaktur, baik skala kecil, menengah, maupun besar, pasti membutuhkan lahan yang relatif cukup luas untuk membangun fasilitas produksinya. Selain itu lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pendirian industri pengolahan juga harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti ketersediaan infrastruktur transportasi, limbah, dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan investasi dibidang jasa yang tidak memerlukan lahan seluas jenis industri lainnya. Apalagi cukup banyak usaha bidang jasa di Kota Surakarta yang bisa peluang bisnis bagi para investor.

5. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian insentif bagi investor, baik PMDN maupun PMA, yang mampu mengembangkan usaha/industri dengan keterkaitan antara usaha/industri penghasil bahan baku dengan usaha/industri pengolah bahan baku (*backward linkage*).

Hal ini mengingat bahwa Kota Surakarta tidak hanya menjadi daerah yang mampu menghasilkan bahan baku namun juga mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Harapannya, agar masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta bisa menikmati nilai tambah (*value added*) dari sebuah proses produksi secara utuh, mulai dari menghasilkan bahan baku, mengolah barang setengah jadi, sampai dengan menghasilkan produk tertentu.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberi insentif kepada investor atau pengusaha yang membuka dan menjalankan usaha/industri untuk menghasilkan bahan baku bagi industri yang sudah ada. Demikian pula sebaliknya memberi insentif bagi investor atau pengusaha yang membuka dan menjalankan usaha/industri untuk mengolah bahan baku atau barang setengah jadi yang dihasilkan daerah ini.

6. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian insentif bagi investor, baik PMDN maupun PMA, yang mampu mengembangkan usaha/industri dengan keterkaitan antara usaha/industri yang menghasilkan sebuah produk tertentu dengan usaha/industri pengguna produk tersebut (*forward linkage*).

Hal ini mengingat bahwa Kota Surakarta tidak hanya menjadi daerah yang mampu mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi saja namun menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Harapannya, agar masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta bisa menikmati nilai tambah (*value added*) dari sebuah proses produksi secara utuh, mulai dari menghasilkan bahan baku, mengolah barang setengah jadi, menghasilkan produk, sampai menggunakan produk tersebut.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya memberi insentif kepada investor atau pengusaha yang membuka dan menjalankan usaha/industri untuk menghasilkan produk tertentu. Demikian pula sebaliknya memberi insentif bagi investor atau pengusaha yang membuka dan menjalankan usaha/industri yang menggunakan berbagai produk yang dihasilkan daerah ini.

7. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang bisa menekan *high cost economy* dan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan di Kota Surakarta, misalnya perijinan yang semakin mudah dan murah, menekan praktek premanisme, dan sebagainya.

Hal ini mengingat bahwa harga atau tarif merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan ketika sebuah produk akan ditawarkan ke pasar. Alasannya, persaingan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas dari produk, namun juga dari harga atau tarifnya. Apalagi mengingat bahwa sebagian masyarakat yang menjadi konsumennya makin cenderung bersikap sensitif terhadap harga atau tarif.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya mempunyai kebijakan, program, dan kegiatan yang bisa mengeliminasi faktor-faktor penyebab munculnya ekonomi berbiaya tinggi. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif produk Kota Surakarta, khususnya dari aspek harga atau tarif.

8. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat kebijakan untuk memberi fasilitas tertentu kepada tenaga kerja yang tercatat sebagai karyawan perusahaan yang berlokasi dan beroperasi di Kota Surakarta, misalnya hak untuk menggunakan Rusunawa.

Hal ini mengingat bahwa Kota Surakarta menghadapi keterbatasan pasokan tenaga kerja, khususnya level *blue collar worker*. Padahal

kebutuhan tenaga kerja dipastikan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan investasi yang masuk di daerah, meskipun usaha/industri yang dibuka diharapkan bukan kategori padat karya.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat kebijakan untuk menyediakan fasilitas yang menarik bagi tenaga kerja luar kota. Hal ini diharapkan dapat menjadi insentif yang mendorong orang mau bekerja di Kota Surakarta meski UMK-nya relatif tidak jauh berbeda dengan daerah lain di kawasan Aglomerasi Soloraya.

9. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat kebijakan pemberian insentif kepada perusahaan yang berlokasi di wilayah Aglomerasi Soloraya untuk membuka *head office* di Kota Surakarta.

Hal ini mengingat bahwa Kota Surakarta dikelilingi oleh beberapa Kabupaten yang mempunyai kawasan industri dengan berbagai perusahaan besar, khususnya Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut pasti memerlukan kantor pusat (*head office*) yang lebih representatif, mudah dijangkau, lebih dikenal, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan untuk memberi insentif bagi perusahaan yang bersedia membuka kantornya di Kota Surakarta. Hal ini dapat menciptakan *value added* bagi Kota Surakarta, baik yang berupa *economic benefit* maupun *financial benefit*. Sementara, di sisi lain, berkantor di kota yang lebih besar akan mempermudah perusahaan dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan rekan bisnisnya.

10. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan investasi bukan pada sektor usaha/industri yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang relatif banyak mengingat keterbatasan pasokan tenaga kerja, yaitu UMKM.

Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan sektor usaha/industri padat karya yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja dibandingkan skala usaha besar. Hal ini sejalan dengan kondisi ketenagakerjaan di Kota Surakarta yang tengah menghadapi keterbatasan pasokan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja level operasional (*blue collar worker*).

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus investasinya pada sektor UMKM yang tidak terlalu tergantung pada tenaga kerja dan. Bahkan jika memungkinkan memfasilitasi investasi pada sektor yang berperan sebagai *supporting system* bagi berbagai usaha/industri yang ada di kawasan Aglomerasi Soloraya, misalnya hotel, restoran/rumah makan, dan sebagainya.

11. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya fokus pada pengembangan usaha/industri yang berbasis pada ekonomi kreatif yang mengedepankan produk yang unik, pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*), perlindungan terhadap hak cipta (*copyright*).

Hal ini mengingat bahwa bisnis saat ini telah berkembang menjadi tidak lagi mengenal tempat, jarak, dan waktu. Kondisi ini membuat masyarakat dunia bisa berbelanja kapan dan dimanapun tanpa harus berpindah tempat dan menunggu waktu tertentu. Sementara, di sisi lain, pedagang tidak lagi membutuhkan lapak, warung, maupun toko untuk memamerkan, menawarkan, dan menjual produk-produknya.

Alasan itulah yang mestinya mendorong Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menetapkan fokus pengembangan investasi pada sektor ekonomi kreatif. Dimana salah satu tujuannya adalah agar berbagai produk yang dihasilkan di daerah ini menjadi diterima dan mampu bersaing di pasar global. Selain itu, dengan pendekatan ekonomi kreatif, diharapkan produk Kota Surakarta menjadi relatif mudah diakses dari seluruh penjuru dunia.

Berdasarkan uraian di atas akan dirumuskan variabel keberhasilan utama pengembangan investasi Kota Surakarta. Hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.4: Variabel Kunci Investasi Kota Surakarta

No	Variabel Keberhasilan	Keterangan
1.	Usaha/Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	UMKM merupakan sektor usaha/industri padat karya dengan jumlah tenaga kerja relatif terbatas sesuai dengan skala usaha/industri, khususnya aset yang dimiliki dan omset yang diperoleh.
2.	Sektor Jasa	Sektor jasa merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh satu pihak tertentu untuk menciptakan manfaat yang dibutuhkan oleh pihak lain pada waktu dan tempat yang telah disepakati tanpa harus melakukan perpindahan kepemilikan.
3.	Fasilitas Tenaga Kerja	Fasilitas tenaga kerja merupakan insentif yang disediakan untuk para pekerja luar kota yang tercatat sebagai karyawan usaha/industri yang berlokasi dan beroperasi di daerah tertentu, misalnya hak untuk menyewa Rusunawa.
4.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi kreatif merupakan upaya untuk mengembangkan sebuah usaha/industri dengan mengedepankan produk yang unik, pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta perlindungan atas hak cipta dari produk tersebut.
5.	<i>High Cost Economy</i>	Menekan <i>high cost economy</i> merupakan upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi berbagai faktor penghambat usaha untuk mewujudkan efisiensi produksi sebuah usaha/industri tertentu, mulai dari infrastruktur, biaya tak terduga, sampai dengan pungutan ilegal.

No	Variabel Keberhasilan	Keterangan
6.	<i>Backward Linkage</i>	<i>Backward linkage</i> merupakan proses produksi yang berkelanjutan dari usaha/industri penghasil bahan baku (hulu) sampai ke pengolahan (hilir) sehingga menjamin keberlangsungan dan nilai tambah dari usaha/industri dalam satu rantai pasokan dapat dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.
7.	<i>Forward Linkage</i>	<i>Forward linkage</i> merupakan proses produksi yang berkelanjutan dari usaha/industri pengolahan (hulu) sampai ke pengguna (hilir) sehingga menjamin keberlangsungan dan nilai tambah dari usaha/industri dalam satu rantai pasokan dapat dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI)	Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan parameter yang berlaku secara nasional untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia yang menjamin kelayakan dan mutu produk, sehingga aman digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat.
9.	Orientasi Ekspor	Produk berorientasi ekspor merupakan produk yang memenuhi standar wajib dan standar umum kelayakan dan kelaikan untuk keamanan dan kualitas barang bersangkutan sebagai modal untuk mengakses pasar luar negeri.
10.	Pusat Perkantoran/ <i>Supporting System</i>	Pusat perkantoran merupakan kawasan yang digunakan sebagai lokasi kegiatan administratif dari satu lebih perusahaan yang pabriknya didirikan dan beroperasi di daerah lain.
11.	Daya Saing Internasional	Produk yang berdaya saing internasional merupakan produk yang memenuhi pengujian dan standar internasional sehingga diterima dapat oleh pasar global karena mempunyai keunggulan kompetitif (<i>competitive advantage</i>) dengan produk sejenis dari negara lain.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

6.3. Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) adalah proses untuk membandingkan performansi aktual dengan performansi potensi. Tujuan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis kesenjangan membantu organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus

diperbaiki. Proses analisis kesenjangan mencakup penetapan, dokumentasi, dan sisi positif keragaman keinginan dan kapabilitas (sekarang).

Analisis kesenjangan dilakukan terhadap sembilan variabel keberhasilan kunci di atas, yaitu (1) Standar Nasional Indonesia, (2) Daya Saing Internasional, (3) Orientasi Ekspor, (4) Sektor Jasa, (5) *Backward Linkage*, (6) *Forward Linkage* (7) Menekan *High Cost Economy*, (8) Fasilitas Tenaga Kerja, (9) Pusat Perkantoran/*Supporting System*, (10) UMKM, dan (11) Ekonomi Kreatif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan dicapai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, analisis kesenjangan juga dilakukan terhadap kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan investasi.

Hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting dan ideal di atas selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan cara mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam mewujudkan strategi pengembangan investasi. Untuk itu langkah awal dalam analisis kesenjangan adalah melakukan identifikasi terhadap semua kondisi eksisting dan kondisi ideal yang mestinya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 6.5: Analisis Kesenjangan Pengembangan Investasi Kota Surakarta

No	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
1.	Usaha/Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	- Usaha/industri mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha/industri padat karya yang jumlah tenaga kerjanya relatif terbatas sesuai dengan skala bisnisnya, khususnya aset yang dimiliki dan omset yang diperolehnya. - Jumlah UMKM di Kota Surakarta cukup banyak dengan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha/industri besar selama beberapa tahun terakhir. - UMKM di Kota Surakarta bergerak pada berbagai sektor usaha/industri yang ada di daerah ini, mulai dari tekstil, kayu, kertas dan percetakan, logam, makanan, sampai dengan pariwisata.	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi yang bisa mendorong UMKM tumbuh menjadi usaha/industri yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang pro dan ramah UMKM/UMKM, misalnya wajib membayar tunai atau masa jatuh tempo pembayaran sependek mungkin untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan sektor usaha ini.	Dinkop Perind Surakarta. UKM Kota
2.	Sektor Jasa	- Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang sebagian besar lahannya digunakan sebagai kawasan permukiman, perniagaan, dan perkantoran, sehingga relatif sulit menyediakan lahan yang relatif cukup luas seperti yang dibutuhkan industri manufaktur/pabrikasi. - Kota Surakarta merupakan daerah dengan wilayah yang tidak memenuhi kualifikasi digunakan sebagai lokasi pendirian industri manufaktur, karena lebar jalan	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan peluang usaha dibidang jasa yang masih potensial untuk dijalankan di daerah ini, disertai dengan informasi mengenai jumlah konsumen, lokasi yang tersedia, pesaing, dan sebagainya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>supporting system</i> bagi	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop Perind Surakarta. UKM Kota - Dinas PUPR Kota Surakarta. - DPMPSTP Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
		yang relatif terbatas dan ketiadaan tempat pembuangan limbah, baik yang berupa laut, air permukaan, maupun aplikasi ke tanah**. ● Kota Surakarta mempunyai peluang yang relatif cukup besar berperan sebagai wilayah <i>supporting system</i> bagi beberapa daerah yang berada di kawasan Aglomerasi Soloraya dengan menyediakan gedung perkantoran, <i>meeting venue</i>, perbankan, dan sebagainya.	perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di kawasan Aglomerasi Soloraya dan sekitarnya.	
3.	Fasilitas Tenaga Kerja	● Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang sebagian besar lahannya digunakan sebagai kawasan permukiman, perniagaan, dan perkantoran, sehingga jenis usaha yang tepat untuk daerah ini adalah jasa (<i>service</i>), yang biasanya bersifat padat karya. ● Kota Surakarta menghadapi keterbatasan pasokan tenaga kerja, khususnya kategori operasional/buruh (<i>blue collar worker</i>) sehingga sangat tergantung pada <i>supply</i> dari luar daerah, khususnya kawasan Aglomerasi Soloraya. ● Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Surakarta relatif tidak jauh berbeda dengan daerah lain di sekitarnya, khususnya kawasan Aglomerasi Soloraya,	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal, mulai dari jumlah tenaga kerja usia produktif, tingkat pendidikan, kompetensi, jumlah kebutuhan tenaga kerja, asal tenaga kerja, dan sebagainya. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi tenaga kerja luar kota yang tercatat di berbagai perusahaan yang berlokasi di daerah ini, misalnya hak untuk menyewa kamar Rusunawa.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. ● Dinas PUPR Kota Surakarta.

N o	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
		sehingga tidak cukup menjadi daya tarik bagi pekerja luar kota.		
4.	Ekonomi Kreatif	● Pelaku ekonomi kreatif di Kota Surakarta relatif cukup banyak yang dikategorikan menjadi 7 kelompok IKM sebagai basis pengembangan industri bisnis inovatif, yaitu fashion; desain; kriya; seni pertunjukan; seni rupa; kuliner; dan jasa pariwisata. ● Kota Surakarta masih cenderung terfokus pada pengembangan industri batik yang menjadi produk unggulan untuk menjadi industri dan produk inovatif unggulan, sehingga menomorduakan berbagai industri dan produk ekonomi kreatif lainnya.	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha/industri untuk menghasilkan produk unik dan kreatif yang mencerminkan kekhasan daerah ini, misalnya menempatkan batik sebagai spirit dari semua produk Kota Surakarta. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya program dan kegiatan fasilitasi meningkatkan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengurus hak cipta atas produk yang dihasilkannya.	● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. ● Diskominfo SP Kota Surakarta.
5.	<i>High Economy Cost</i>	● Salah satu aspek penting dalam persaingan bisnis di masa depan adalah harga/tarif, dimana usaha/industri yang mampu menawarkan barang dan jasa dengan harga/tarif yang lebih kompetitif dibandingkan yang lain yang akan menang dan menguasai pasar. ● Menurut beberapa studi yang pernah dilakukan, menunjukkan besaran biaya siluman (<i>invisible hand cost</i>) di Indonesia mencapai 20%-30% dari total biaya ekonomi, maka tidak mengherankan jika	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan instrumen yang dapat mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang mengakibatkan produk dari daerah ini menjadi tidak kompetitif di pasar global. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya melakukan pengawasan secara intensif, kontinyu, dan berkelanjutan untuk menekan penyebab munculnya faktor-faktor ekonomi berbiaya tinggi.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Balitbangda Kota Surakarta. ● Bappeda Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
		proses produksi menjadi tidak efisien sehingga membuat produknya tidak kompetitif, khususnya dari aspek harga/tarif.		
6.	<i>Backward Linkage</i>	- Sebagian besar usaha/industri di Kota Surakarta cenderung belum saling terkait antara satu dengan yang lain karena mempunyai sektor bisnisnya berbeda dan tidak berada dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama. - Keterkaitan antar usaha/industri dari hulu sampai ke hilir diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap keberlanjutan dan nilai tambah dari satu bisnis dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, sehingga masyarakat ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah dapat menjadi lebih optimal.	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>backward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop Perind Kota Surakarta. - Balitbangda Kota Surakarta.
7.	<i>Forward Linkage</i>	- Sebagian besar usaha/industri di Kota Surakarta cenderung belum saling terkait antara satu dengan yang lain karena mempunyai sektor bisnisnya berbeda dan tidak berada dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama. - Keterkaitan antar usaha/industri dari hulu sampai ke hilir diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap keberlanjutan dan nilai tambah dari satu bisnis dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama,	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Kota Surakarta. - Balitbangda Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
		sehingga masyarakat ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah dapat menjadi lebih optimal.	usaha yang bersifat <i>forward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.	
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI)	● Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi produk berlabel SNI yang berkualitas, terjamin mutu, dan aman bagi kesehatan semakin tinggi. ● Produk yang dihasilkan Kota Surakarta, khususnya yang masuk dalam daftar wajib SNI, belum semuanya memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk memperoleh sertifikat/label SNI.* ● Pemerintah Kota Surakarta belum mempunyai data komprehensif mengenai produk yang dihasilkan di daerah ini yang masuk dalam daftar wajib SNI, produk yang telah berlabel SNI, memenuhi kualifikasi untuk memperoleh sertifikat/label SNI, serta data lain yang relevan yang terkait dengan SNI.	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan keberadaan produk yang sudah berlabel SNI, produk memenuhi kualifikasi pengajuan sertifikasi SNI, produk yang harus ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan sertifikasi SNI, dan sebagainya. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi pengajuan sertifikasi SNI bagi produk yang dinilai memenuhi kriteria SNI. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas sebuah produk agar memenuhi kriteria SNI.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop Perind UKM Kota Surakarta.
9.	Orientasi Ekspor	● Nilai ekspor produk Kota Surakarta cenderung mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir, khususnya untuk jenis barang yang tahan lama, seperti kain <i>eco printing</i>, dekorasi rumah, furniture, serta kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) dari kayu, batu, dan logam.	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi ekspor, nilai ekspor, negara tujuan, dan informasi lain yang relevan. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop Perind UKM Kota Surakarta. ● DPMPSTSP Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
		- Barang sejenis produk ekspor andalan Kota Surakarta juga diproduksi negara lain yang kemudian ditawarkan dan dijual di pasar global dengan harga yang relatif lebih kompetitif. - Jenis produk Kota Surakarta yang dapat dikategorikan berkualitas dan berorientasi ekspor, terutama dari aspek kualitas, harga, kontinuitas produksi, kemasan, dan sebagainya, relatif masih terbatas dibandingkan total jenis produk yang dihasilkan di daerah ini.	fasilitasi peningkatan kemampuan usaha/industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi agar setiap usaha/industri mempunyai peluang mengeksport produknya, misalnya dalam bentuk penyelenggaraan ekspor di dalam maupun diluar negeri.	
10	Pusat Perkantoran/ <i>Supporting System</i>	- Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang sebagian besar lahannya digunakan sebagai kawasan permukiman, perniagaan, dan perkantoran, sehingga jenis usaha yang tepat untuk daerah ini adalah jasa (<i>service</i>) yang bersifat <i>supporting system</i> bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di kawasan Aglomerasi Soloraya. - Di Kota Surakarta banyak terdapat hotel bintang, restoran/rumah makan, gedung MICE (<i>meeting, incentive, convention, and exhibition</i>), perbankan, serta fasilitas dan infrastruktur pendukung investasi lain dibandingkan daerah lain di kawasan Aglomerasi Soloraya.	Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha jasa <i>supporting system</i> bagi daerah di kawasan Aglomerasi Soloraya dengan menyediakan gedung perkantoran, gedung MICE, hotel, restoran/rumah makan, perbankan, dan sebagainya.	- Dinas PUPR Kota Surakarta. - DPMPTSP Kota Surakarta. - PHRI Kota Surakarta. - Apkrindo Kota Surakarta.

N o	Variabel Kunci	Kondisi Eksisting	Alternatif Solusi	Stakeholder
11	Daya Saing Internasional	- Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO), dimana konsekuensinya produk dari negeri lain menjadi bebas masuk dan diperjualbelikan di Indonesia, termasuk Kota Surakarta. - Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO), dimana konsekuensinya produk Indonesia, termasuk Kota Surakarta, bebas masuk dan diperjualbelikan di negara lain yang menjadi anggota WTO. - Produk Kota Surakarta harus mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek diferensiasi dan efisiensi skala produksi, sehingga mempunyai perbedaan, menarik, berkualitas, dan murah dibandingkan produk sejenis dari negara lain.	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi daya saing internasional, disertai dengan inovasi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, mutu, keamanan, dan kesehatan barang tersebut. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan kreatifitas agar para pengusaha terdorong untuk selalu menghasilkan produk yang inovatif dan unik. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk mendorong kemampuan sebuah usaha/industri dalam meningkatkan efisiensi proses produksinya.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Politeknik ATMI Surakarta.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Keterangan:

*

: <https://www.b4t.go.id/service/update-daftar-sertifikat-sni/>

**

: **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri** ada tiga tempat yang diizinkan untuk membuang limbah industri, yaitu laut, air permukaan, dan aplikasi ke tanah.

Disnaker

: Dinas Tenaga Kerja.

Dinkop UKM Perind

: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Dinas PUPR

: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

DPMPTSP

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Diskominfo SP : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Balitbangda : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
PHRI : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
Apkrindo : Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia.

. Upaya ini sebenarnya dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mendorong pengusaha di Kota Surakarta untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga.

6.4. *Action Plan* Investasi

Langkah berikut yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah menyusun *roadmap* pengembangan investasi Kota Surakarta. Roadmap akan disusun berdasarkan variabel keberhasilan kunci yang telah berhasil diidentifikasi di bagian sebelumnya, yaitu (1) Standar Nasional Indonesia, (2) Daya Saing Internasional, (3) Orientasi Ekspor, (4) Sektor Jasa, (5) *Backward Linkage*, (6) *Forward Linkage* (7) Menekan *High Cost Economy*, (8) Fasilitas Tenaga Kerja, (9) Pusat Perkantoran/*Supporting System*, (10) UMKM, dan (11) Ekonomi Kreatif..

Roadmap pengembangan investasi Kota Surakarta dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan mengembangkan rencana aksi (*action plan*) dan *pipeline*. Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu rencana aksis harus dirumuskan dan dinyatakan dalam bentuk tahapan yang akan dilaksanakan di masa depan untuk mewujudkan sasaran strategis. Sedangkan *pipeline* adalah visualisasi dari tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang disusun untuk menentukan berbagai faktor yang berpotensi menjadi kendala dan keberhasilan upaya tersebut.

Untuk melengkapi rencana aksi dan *pipeline*, kajian ini akan mengidentifikasi *stakeholder* yang akan terlibat dalam proses pengembangan investasi Kota Surakarta. Keterlibatan *stakeholder* ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikarenakan proses pengembangan investasi Kota Surakarta bersifat lintas sektoral.

Tabel 6.6: Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Surakarta

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
1.	Usaha/Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi yang bisa mendorong UMKM tumbuh menjadi usaha/industri yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang pro dan ramah UMKM/UMKM, misalnya wajib membayar tunai atau masa jatuh tempo pembayaran sependek mungkin untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan sektor usaha ini.					● Jumlah UMKM meningkat. ● Jumlah UMKM yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif meningkat.	● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta.
2.	Sektor Jasa	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan peluang usaha dibidang jasa yang masih potensial untuk dijalankan di daerah ini, disertai dengan informasi mengenai jumlah konsumen, lokasi yang tersedia, pesaing, dan sebagainya. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>supporting system</i> bagi perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di kawasan Aglomerasi Soloraya dan sekitarnya.					Jumlah investasi sektor usaha lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, baik jumlah maupun nilai investasinya.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. ● Dinas PUPR Kota Surakarta. ● DPMPTSP Kota Surakarta.
3.	Fasilitas Tenaga Kerja	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal, mulai dari jumlah tenaga kerja usia produktif, tingkat pendidikan, kompetensi, jumlah kebutuhan tenaga kerja, asal tenaga kerja, dan sebagainya.					Kebijakan (peraturan/keputusan pimpinan daerah) untuk tenaga kerja luar kota.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop UKM Kota Surakarta. ● Dinas PUPR Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
		● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi tenaga kerja luar kota yang tercatat di berbagai perusahaan yang berlokasi di daerah ini, misalnya hak untuk menyewa kamar Rusunawa.						
4.	Ekonomi Kreatif	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha/industri untuk menghasilkan produk unik dan kreatif yang mencerminkan kekhasan daerah ini, misalnya menempatkan batik sebagai spirit dari semua produk Kota Surakarta. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya program dan kegiatan fasilitasi meningkatkan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengurus hak cipta atas produk yang dihasilkannya.					Jumlah pelaku ekonomi kreatif meningkat.	● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. ● Diskominfo SP Kota Surakarta.
5.	<i>High Cost Economy</i>	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan instrumen yang dapat mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang mengakibatkan produk dari daerah ini menjadi tidak kompetitif di pasar global. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya melakukan pengawasan secara intensif, kontinyu, dan berkelanjutan untuk menekan penyebab munculnya faktor-faktor ekonomi berbiaya tinggi.					Harga/tarif produk semakin kompetitif dibandingkan harga/tarif produk sejenis dari daerah/negara lain.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Balitbangda Kota Surakarta. ● Bappeda Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
6.	<i>Backward Linkage</i>	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>backward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.					Jumlah perusahaan yang bersifat <i>backward linkage</i> meningkat.	• Disnaker Kota Surakarta. • Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. • Balitbangda Kota Surakarta.
7.	<i>Forward Linkage</i>	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>forward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.					Jumlah perusahaan yang bersifat <i>forward linkage</i> meningkat.	• Disnaker Kota Surakarta. • Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. • Balitbangda Kota Surakarta.
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI)	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan keberadaan produk yang sudah berlabel SNI, produk memenuhi kualifikasi pengajuan sertifikasi SNI, produk yang harus ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan sertifikasi SNI, dan sebagainya. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi					Jumlah produk berlabel SNI meningkat.	• Disnaker Kota Surakarta. • Dinkop UKM Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
		pengajuan sertifikasi SNI bagi produk yang dinilai memenuhi kriteria SNI. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas sebuah produk agar memenuhi kriteria SNI.						
9.	Orientasi Ekspor	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi ekspor, nilai ekspor, negara tujuan, dan informasi lain yang relevan. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan usaha/industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga. • Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi agar setiap usaha/industri mempunyai peluang mengeksport produknya, misalnya dalam bentuk penyelenggaraan ekspo di dalam maupun diluar negeri.					Jumlah produk yang layak dan laik ekspor meningkat.	• Disnaker Kota Surakarta. • Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. • DPMPTSP Kota Surakarta.
10.	Pusat Perkantoran/ <i>Supporting System</i>	• Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha jasa <i>supporting system</i> bagi daerah di kawasan Aglomerasi Soloraya dengan menyediakan gedung perkantoran, gedung MICE, hotel, restoran/rumah makan, perbankan, dan sebagainya.					• Jumlah perusahaan dari kawasan Aglomerasi Soloraya yang berkantor di Kota Surakarta meningkat. • Jumlah kegiatan MICE meningkat.	• Dinas PUPR Kota Surakarta. • DPMPTSP Kota Surakarta. • PHRI Kota Surakarta. • Apkrindo Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
11.	Daya Saing Internasional	● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi daya saing internasional, disertai dengan inovasi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, mutu, keamanan, dan kesehatan barang tersebut. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan kreatifitas agar para pengusaha terdorong untuk selalu menghasilkan produk yang inovatif dan unik. ● Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk mendorong kemampuan sebuah usaha/industri dalam meningkatkan efisiensi proses produksinya.					● Produk baru yang lebih inovatif diperkenalkan secara periodik dan kontinyu. ● Tingkat penjualan produk lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari negara lain. Demand lokal, regional, internal untuk produk tersebut meningkat.	● Disnaker Kota Surakarta. ● Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. ● Politeknik ATMI Surakarta.

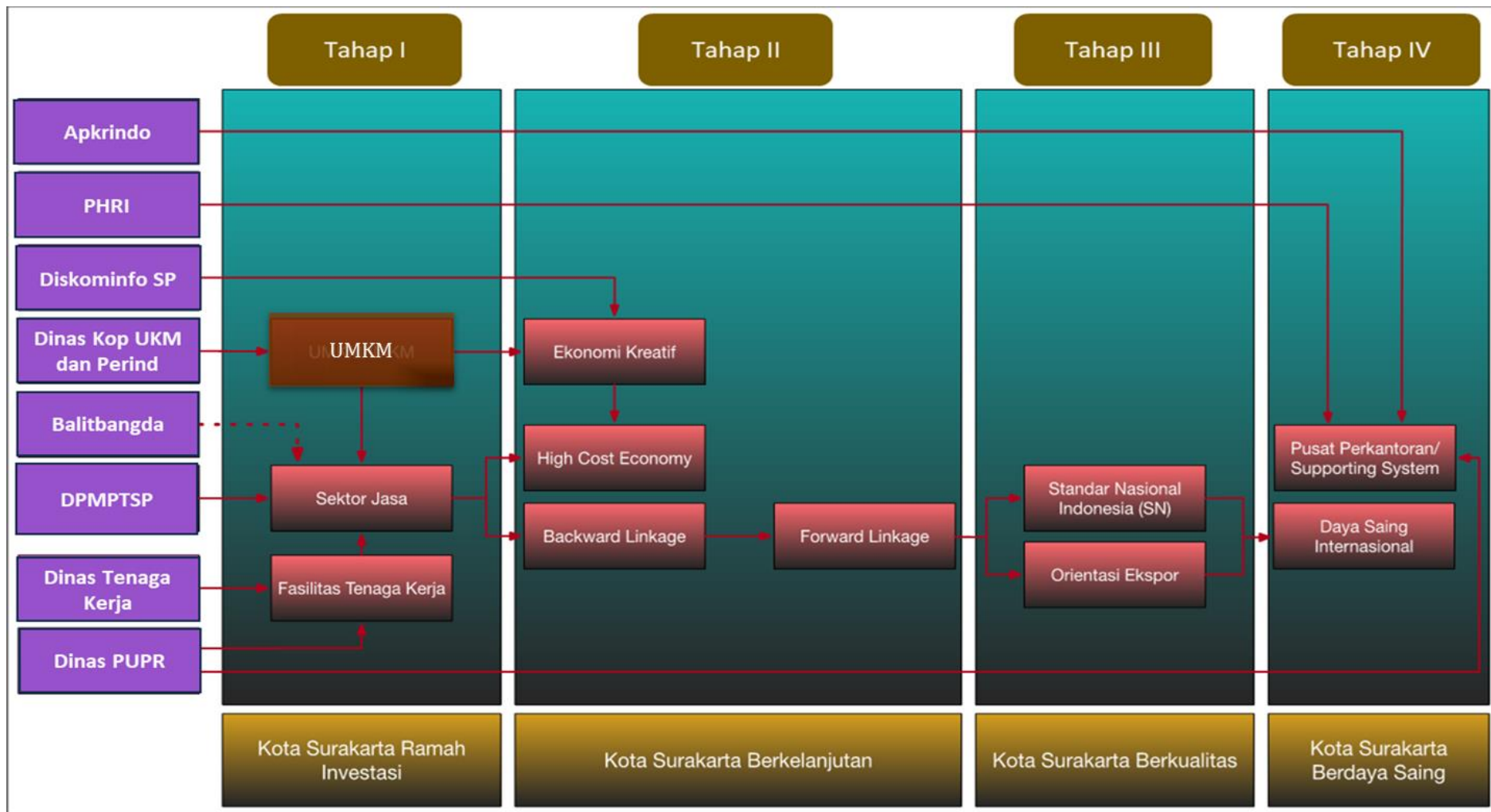
Sumber: Data primer diolah, 2023.

Keterangan:

Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja.
Dinkop UKM Perind	: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Dinas PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Diskominfo SP	: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Balitbangda	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
PHRI	: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.
Apkrindo	: Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia.

Selanjutnya, untuk melengkapi kajian ini, akan disusun *pipeline* untuk mempermudah dalam memahami rencana aksi pengembangan investasi Kota Surakarta. *Pipeline* akan disusun dalam lima tahapan pencapaian target seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan variabel kunci kesuksesan pengembangan investasi Kota Surakarta. Dimana setiap tahapan kegiatan tidak bersifat serial namun bisa dilaksanakan secara paralel dalam satu periode waktu yang sama dengan tahapan lain.

Pipeline adalah visualisasi dari tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang disusun untuk menentukan berbagai faktor yang berpotensi menjadi kendala dan keberhasilan upaya tersebut. Oleh sebab itu *pipeline* akan dikembangkan dengan menggunakan variabel kesuksesan kunci kunci, yaitu (1) Standar Nasional Indonesia, (2) Daya Saing Internasional, (3) Orientasi Ekspor, (4) Sektor Jasa, (5) *Backward Linkage*, (6) *Forward Linkage* (7) Menekan *High Cost Economy*, (8) Fasilitas Tenaga Kerja, (9) Pusat Perkantoran, (10) UMKM, dan (11) Ekonomi Kreatif.



Gambar 6.2: Pipeline Masterplan Pengembangan Investasi Kota Surakarta

6.5. Tahapan Capaian Pengembangan Investasi

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta disajikan sebagai pelengkap untuk rencana aksi (*action plan*) dan *pipeline* yang telah disusun di bagian sebelumnya. Oleh sebab itu arah pengembangan ini disusun berdasarkan hasil analisis jangka panjang upaya pengembangan investasi di Kota Surakarta. Dimana untuk mempermudah pelaksanaannya strategi jangka panjang tersebut dibagi menjadi 4 tahapan dengan periode waktu lima tahunan, sebagai berikut:

1. Tahap I (2025-2030)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Ramah Investasi”**, yang artinya Kota Surakarta tidak hanya akan memberi kesempatan kepada pelaku usaha/industri besar saja, namun juga pada pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor jasa. Namun demikian Kota Surakarta tetap membuka pintu untuk investasi yang bergerak di bidang lainnya dengan tetap mempertahankan ketersediaan lahan yang ada.

Kota Surakarta, selain dari perspektif investor, juga menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentuan keberhasilan investasi. Oleh sebab itu Kota Surakarta akan mempersiapkan kebijakan yang ramah terhadap tenaga kerja, khususnya berupa berbagai fasilitas yang diharapkan dapat memicu dan memacu peningkatan kinerja para pekerja tersebut.

2. Tahap II (2030-2035)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Berkelanjutan”**, yang artinya Kota Surakarta menempatkan sektor usaha/industri sebagai entitas yang diharapkan akan *going concern* atau akan ada selama-lamanya serta menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan daerah ini. Oleh sebab itu Kota Surakarta akan selalu berusaha menekan berbagai kendala yang

dianggap menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha/industri.

Kota Surakarta juga akan menyiapkan kebijakan yang bisa mendorong sektor usaha/industri mengikuti perkembangan dunia bisnis yang cenderung *turbulence*. Selain itu Kota Surakarta akan memfasilitasi agar sektor usaha/industri selalu berusaha menciptakan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan agar keberadaannya makin bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Tahap III (2035-2040)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah “**Kota Surakarta Berkualitas**”, yang artinya Kota Surakarta akan mendorong inovasi dan kreatifitas sektor usaha/industri dalam meningkat kualitas produk-produknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari semakin mengglobalnya dunia bisnis, dimana kualitas dan harga/tarif produk akan menjadi salah satu faktor penentu untuk masuk dan menang di pasar.

Kota Surakarta akan menyiapkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi bagi sektor usaha/industri dalam memaksimalkan kapasitas, potensi, dan sumberdaya sebagai upaya meningkatkan kualitas produknya. Dimana tujuannya adalah agar produk tersebut memenuhi kriteria atau persyaratan aksesibilitas dan akseptabilitas nasional, regional, serta global.

4. Tahap IV (2040-2045)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah “**Kota Surakarta Berdaya Saing**”, yang artinya Kota Surakarta akan meningkatkan daya saingnya, baik ditingkat nasional, regional, dan global. Peningkatan daya saing tersebut tidak sebatas pada produk yang dihasilkan namun juga posisi Kota Surakarta sebagai daerah yang

mempunyai daya dukung (*supporting system*) bagi dunia usaha yang cukup lengkap.

Kota Surakarta akan menyiapkan instrumen yang tepat, baik yang berupa kebijakan, peraturan, insentif, maupun infrastruktur, untuk mewujudkan semua target tersebut. Dimana capaian pada tahap ini sebenarnya merupakan akumulasi dari seluruh usaha dan hasil pada tahapan-tahapan sebelumnya. Oleh sebab itu komitmen untuk melaksanakan arah pengembangan investasi pada setiap tahap menjadi kunci mewujudkan Kota Surakarta sebagai daerah tujuan investasi unggulan.

BAB VII:

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

7.1. Arah Kebijakan

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta disajikan sebagai pelengkap untuk rencana aksi (*action plan*) dan *pipeline* yang telah disusun di bagian sebelumnya. Oleh sebab itu arah pengembangan ini disusun berdasarkan hasil analisis jangka panjang upaya pengembangan investasi di Kota Surakarta. Dimana untuk mempermudah pelaksanaannya strategi jangka panjang tersebut dibagi menjadi 4 tahapan dengan periode waktu lima tahunan, sebagai berikut:

1. Tahap I (2025-2030)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Ramah Investasi”**, yang artinya Kota Surakarta tidak hanya akan memberi kesempatan kepada pelaku usaha/industri besar saja, namun juga pada pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor jasa. Namun demikian Kota Surakarta tetap membuka pintu untuk investasi yang bergerak dibidang lainnya dengan tetap mempertahankan ketersediaan lahan yang ada.

Kota Surakarta, selain dari perspektif investor, juga menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentuan keberhasilan investasi. Oleh sebab itu Kota Surakarta akan mempersiapkan kebijakan yang ramah terhadap tenaga kerja, khususnya berupa berbagai fasilitas yang diharapkan dapat memicu dan memacu peningkatan kinerja para pekerja tersebut.

2. Tahap II (2030-2035)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Berkelanjutan”**, yang artinya Kota Surakarta menempatkan sektor usaha/industri sebagai entitas yang

diharapkan akan *going concern* atau akan ada selama-lamanya serta menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan daerah ini. Oleh sebab itu Kota Surakarta akan selalu berusaha menekan berbagai kendala yang dianggap menghambat pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha/industri.

Kota Surakarta juga akan menyiapkan kebijakan yang bisa mendorong sektor usaha/industri mengikuti perkembangan dunia bisnis yang cenderung *turbulence*. Selain itu Kota Surakarta akan memfasilitasi agar sektor usaha/industri selalu berusaha menciptakan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan agar keberadaannya makin bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Tahap III (2035-2040)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Berkualitas”**, yang artinya Kota Surakarta akan mendorong inovasi dan kreatifitas sektor usaha/industri dalam meningkat kualitas produk-produknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari semakin mengglobalnya dunia bisnis, dimana kualitas dan harga/tarif produk akan menjadi salah satu faktor penentu untuk masuk dan menang di pasar.

Kota Surakarta akan menyiapkan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi bagi sektor usaha/industri dalam memaksimalkan kapasitas, potensi, dan sumberdaya sebagai upaya meningkatkan kualitas produknya. Dimana tujuannya adalah agar produk tersebut memenuhi kriteria atau persyaratan aksesibilitas dan akseptabilitas nasional, regional, serta global.

4. Tahap IV (2040-2045)

Arah pengembangan investasi Kota Surakarta pada tahap ini adalah **“Kota Surakarta Berdaya Saing”**, yang artinya Kota Surakarta akan meningkatkan daya saingnya, baik ditingkat nasional, regional, dan global. Peningkatan daya saing tersebut tidak sebatas pada produk

yang dihasilkan namun juga posisi Kota Surakarta sebagai daerah yang mempunyai daya dukung (*supporting system*) bagi dunia usaha yang cukup lengkap.

Kota Surakarta akan menyiapkan instrumen yang tepat, baik yang berupa kebijakan, peraturan, insentif, maupun infrastruktur, untuk mewujudkan semua target tersebut. Dimana capaian pada tahap ini sebenarnya merupakan akumulasi dari seluruh usaha dan hasil pada tahapan-tahapan sebelumnya. Oleh sebab itu komitmen untuk melaksanakan arah pengembangan investasi pada setiap tahap menjadi kunci mewujudkan Kota Surakarta sebagai daerah tujuan investasi unggulan.

7.2. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Surakarta mewujudkan visi, misi, dan tujuan investasi di daerah ini secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, kajian ini menggunakan beberapa pendekatan, khususnya Analisis SWOT, Analisis TOWS, dan Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*). Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*treath*). Dimana hasilnya digunakan sebagai dasar melakukan Analisis TOWS, yaitu menyusun strategi yang menggunakan kekuatan untuk meraih peluang, menekan kelemahan untuk meraih peluang, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, dan menekan kelemahan untuk menghadapi ancaman.

Hasil Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi variabel keberhasilan utama (*key success variable*). Selanjutnya dilakukan Analisis Kesenjangan untuk menentukan alternatif solusi yang kemudian dikembangkan menjadi strategi. Tahap terakhir yang dilakukan dalam kajian ini adalah menentukan arah kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan investasi di daerah ini.

Tabel 7.1: Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Investasi Kota Surakarta

No	Aspek	Tahap I Tahun 2025-2030	Tahap II Tahun 2030-2035	Tahap III Tahun 2035-2040	Tahap IV Tahun 2040-2045
1.	Arah Kebijakan	Kota Surakarta Ramah Investasi	Kota Surakarta Berkelanjutan	Kota Surakarta Berkualitas	Kota Surakarta Berdaya Saing
2.	Strategi	- Menyusun data terkait peluang usaha dibidang jasa yang prospektif. - Menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>supporting system</i> bagi perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di kawasan Aglomerasi Soloraya dan sekitarnya. - Menyusun data komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal, mulai dari jumlah tenaga kerja usia produktif, tingkat pendidikan, kompetensi, jumlah kebutuhan tenaga kerja, asal tenaga kerja, dan sebagainya. - Menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi tenaga kerja luar kota	- Menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. - Menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>backward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya. - Menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya.	- Menyusun data terkait dengan keberadaan produk yang sudah berlabel SNI, produk memenuhi kualifikasi pengajuan sertifikasi SNI, produk yang harus ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan sertifikasi SNI, dan sebagainya. - Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi pengajuan sertifikasi SNI bagi produk yang dinilai memenuhi kriteria SNI. - Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas sebuah produk agar memenuhi kriteria SNI. - Menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi ekspor, nilai ekspor, negara	- Menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi daya saing internasional, disertai dengan inovasi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, mutu, keamanan, dan kesehatan barang tersebut. - Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan kreatifitas agar para pengusaha terdorong untuk selalu menghasilkan produk yang inovatif dan unik. - Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk mendorong kemampuan sebuah usaha/industri dalam meningkatkan efisiensi proses produksinya. - Menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif

No	Aspek	Tahap I Tahun 2025-2030	Tahap II Tahun 2030-2035	Tahap III Tahun 2035-2040	Tahap IV Tahun 2040-2045
		yang tercatat di berbagai perusahaan yang berlokasi di daerah ini, misalnya hak untuk menyewa kamar Rusunawa. • Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi yang bisa mendorong UMKM tumbuh menjadi usaha/industri yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif. • Menyiapkan kebijakan yang pro dan ramah UMKM/UMKM, misalnya wajib membayar tunai atau masa jatuh tempo pembayaran sependek mungkin untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan sektor usaha ini.	• Menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>forward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya. • Menyiapkan instrumen yang dapat mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang mengakibatkan produk dari daerah ini menjadi tidak kompetitif di pasar global. • Melakukan pengawasan secara intensif, kontinyu, dan berkelanjutan untuk menekan penyebab munculnya faktor-faktor ekonomi berbiaya tinggi. • Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha/industri untuk menghasilkan produk unik dan kreatif yang mencerminkan kekhasan daerah ini, misalnya menempatkan batik sebagai spirit dari semua produk Kota Surakarta.	tujuan, dan informasi lain yang relevan. • Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan usaha/industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga. • Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi agar setiap usaha/industri mempunyai peluang mengeksport produknya, misalnya dalam bentuk penyelenggaraan ekspo di dalam maupun diluar negeri.	bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha jasa <i>supporting system</i> bagi daerah di kawasan Aglomerasi Soloraya dengan menyediakan gedung perkantoran, gedung MICE, hotel, restoran/rumah makan, perbankan, dan sebagainya.

No	Aspek	Tahap I Tahun 2025-2030	Tahap II Tahun 2030-2035	Tahap III Tahun 2035-2040	Tahap IV Tahun 2040-2045
			Menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi meningkatkan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengurus hak cipta atas produk yang dihasilkannya.		

Sumber: Data primer diolah, 2023.

BAB VIII: PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk bagi Kota Surakarta. Alasan inilah yang mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta menyusun kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta ini sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman dalam pengembangan berbagai kebijakan investasi daerah, khususnya dalam jangka panjang. Dimana dari analisis yang telah dilakukan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Surakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Surakarta sehingga dinamika yang terjadi di Kabupaten di sekitarnya juga akan memberi dampak terhadap daerah ini, termasuk di bidang investasi.
2. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan investasi cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir, yang menjadi salah satu bukti daya tarik daerah ini bagi investor untuk membuka dan menjalankan usaha.
3. Kota Surakarta merupakan daerah yang relatif cukup kondusif, aman, dan menjanjikan bagi bisnis sehingga investasi yang masuk tidak hanya terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) namun juga Penanaman Modal Asing (PMA).
4. Kota Surakarta merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan investasi UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal usaha besar, yang bisa menjadi salah satu modal dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
5. Kota Surakarta merupakan daerah yang sebagian besar investasi dalam negeri dan asing yang masuk ditanamkan pada usaha hotel dan restoran sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor jasanya, khususnya pariwisata.

6. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai tiga sektor investasi unggulan, yaitu pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ketiga sektor tersebut dibandingkan dengan sektor lainnya.
7. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai kelemahan inheren sebagaimana wilayah perkotaan lain di Indonesia, yaitu keterbatasan dalam menyediakan lahan yang relatif cukup luas bagi investasi usaha pabrikasi.

8.2. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, untuk mendukung hasil kajian ini terdapat 10 rekomendasi yang disajikan melalui bagan sebagai berikut:



Adapun penjelasan atas bagan rekomendasi di atas yaitu:

1. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan sektor prioritas setiap tahapan dalam masterplan. Penetapan sektor prioritas melalui identifikasi terhadap sektor prioritas seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi untuk fokus investasi.
2. Pemerintah Kota Surakarta mendorong pembangunan dan pengembangan pusat bisnis modern dan fasilitas coworking untuk mendukung pertumbuhan perusahaan start-up.
3. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pengembangan berbagai pelatihan dengan mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil.
4. Pemerintah Kota Surakarta Mendorong inovasi teknologi dengan memberikan insentif kepada perusahaan teknologi dan start-up.

5. Pemerintah Kota Surakarta terus membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
6. Pemerintah Kota Surakarta melakukan peningkatan infrastruktur digital dengan mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan konektivitas internet.
7. Mengembangkan kampanye promosi investasi yang kuat untuk menarik lebih banyak investor di Kota Surakarta.
8. Pemerintah Kota Surakarta memberikan insentif untuk investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
9. Terus meningkatkan iklim bisnis dengan penyederhanaan regulasi dan perizinan dalam mendukung kemudahan berbisnis.
10. Melakukan evaluasi berkala terhadap masterplan investasi untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan.